



Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

# #Energi Berkeadilan

Disampaikan pada Kuliah Umum di Universitas Airlangga Surabaya

Surabaya, 12 April 2018



[www.esdm.go.id](http://www.esdm.go.id)



Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



@KementerianESDM



@kesdm



Kementerian ESDM



## #EnergiBerkeadilan

Untuk Kesejahteraan Rakyat, Iklim Usaha dan Pertumbuhan Ekonomi

### Rasio Elektrifikasi

- ✓ Peningkatan Kapasitas Listrik (35.000 MW)
- ✓ Listrik Perdesaan
- ✓ Melistriki 2500 Desa
- ✓ Tarif listrik EBT

### Pemerataan & Keterjangkauan

- ✓ Subsidi Tepat Sasaran
- ✓ BBM Satu Harga
- ✓ Jaringan Gas
- ✓ Konverter Kit LPG untuk Nelayan
- ✓ 1 Nozel SPBG di setiap SPBU

### Keberlanjutan

- ✓ Pemanfaatan EBT
- ✓ Pokok-Pokok PPA
- ✓ Pembangkit Listrik Mulut Tambang
- ✓ Pembangkit Listrik Mulut Sumur Gas

### Investasi & Pertumbuhan

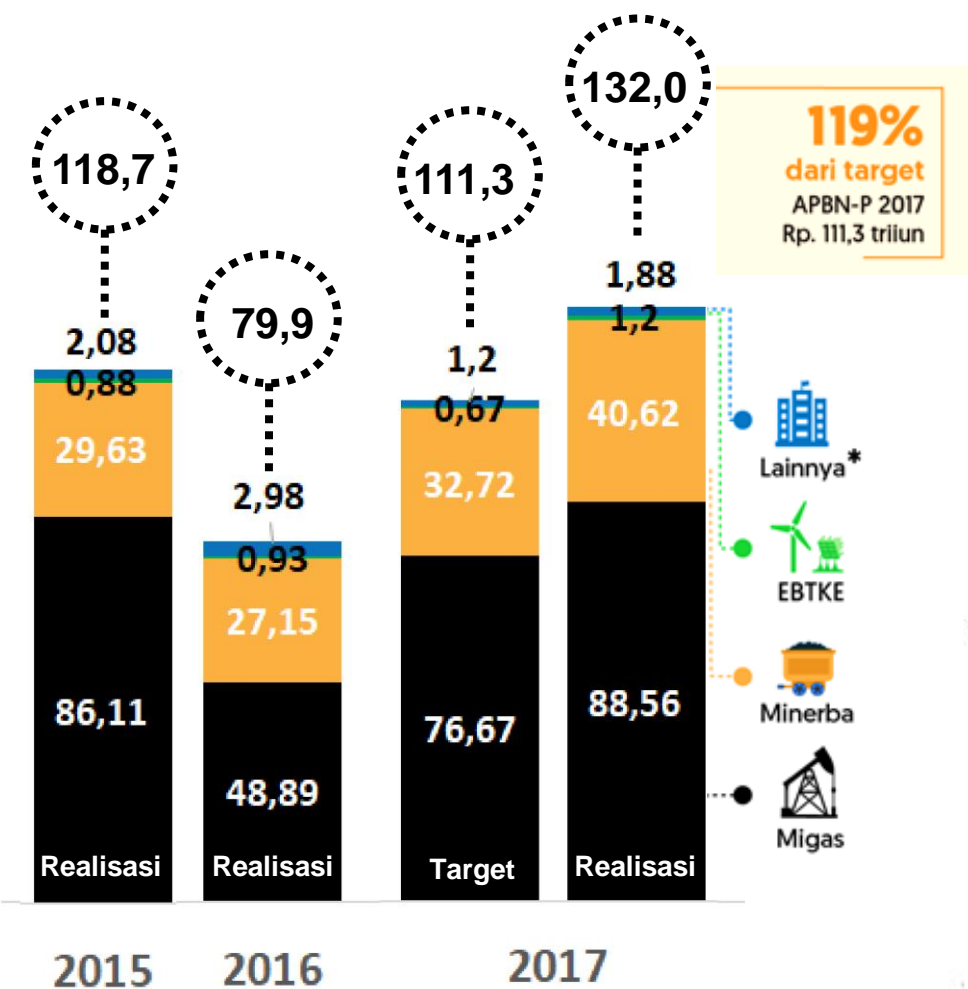
- ✓ Hilirisasi Minerba
- ✓ PI 10% dari Kontrak Migas
- ✓ Kilang Swasta
- ✓ Harga Gas Industri
- ✓ PSC *Gross Split*
- ✓ Pengembalian *Sunk Cost* - PSC

### Reformasi Birokrasi

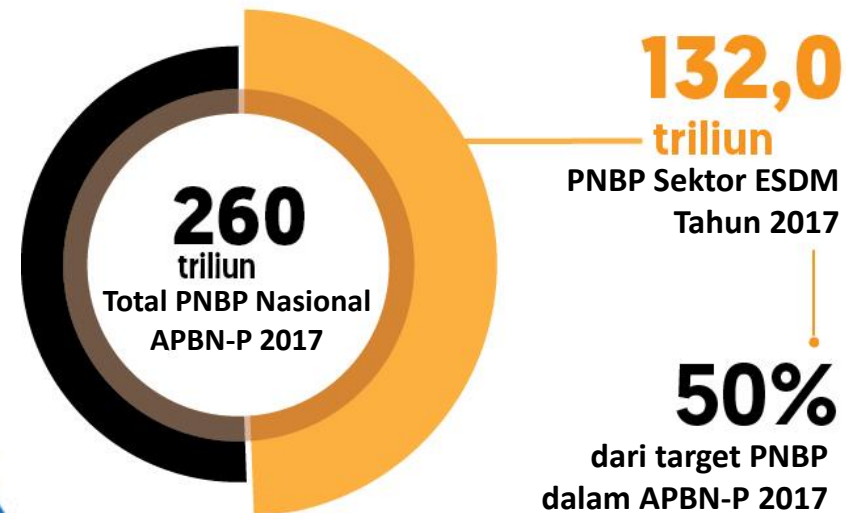
- ✓ Penyederhanaan Perizinan
- ✓ *Online System*
- ✓ *Good Governance*
- ✓ Akuntabilitas

**Kedaulatan dan Kemandirian Energi**

# PNBP SEKTOR ESDM TAHUN 2017 MELEBIHI TARGET



## Separuh PNBPNasional dari Sektor ESDM



\* Penerimaan lainnya mencakup iuran badan usaha hilir migas (BBM dan Gas Pipa), Penjualan, Jasa Sewa, Diklat, Penerimaan BLU dan Lainnya

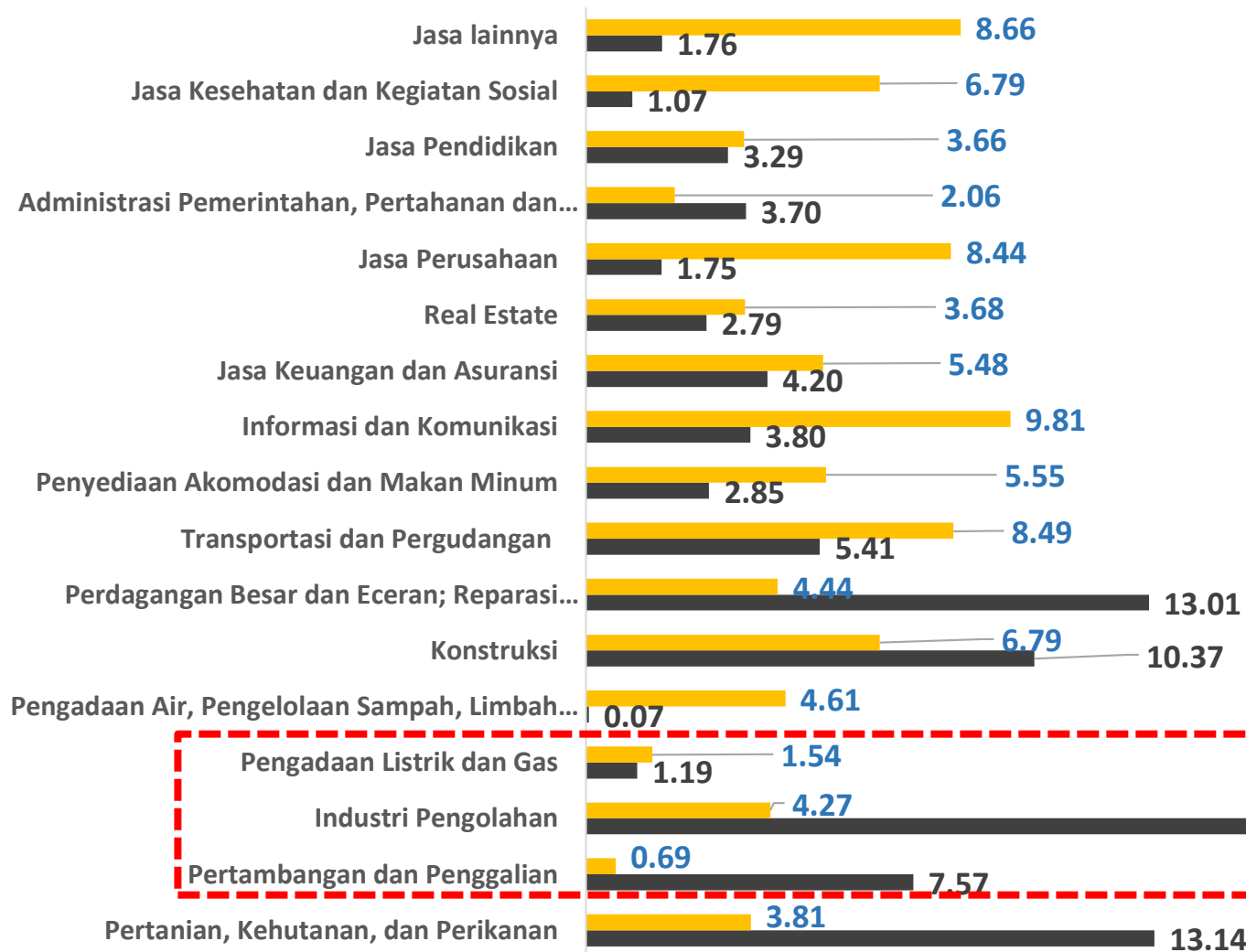


**Sektor ESDM** Mempunyai Peran penting Bagi pertumbuhan Ekonomi nasional. Separuh Pendapatan Nasional Bukan Pajak Berasal dari sektor ini"

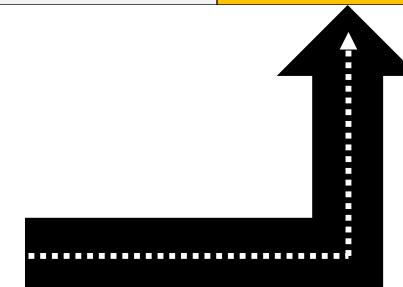
- IGNASIUS JONAN



# Kontribusi Sektor ESDM Terhadap PDB



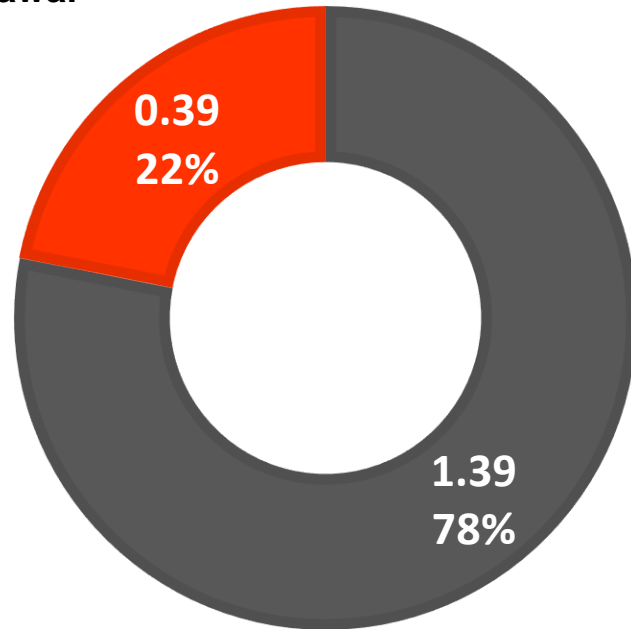
Sektor	Distribusi Thd PDB (%)	Pertumbuhan 2017 (yoy,%)
<b>1. Pertambangan dan Penggalian</b>	7,57	0,69
<b>2. Industri Pengolahan :</b>		
2.1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas	2,27	-0,32
2.2. Industri Logam Dasar	0,73	5,87
<b>3. Pengadaan Listrik dan Gas</b>		
3.1. Ketenagalistrikan	0,98	2,41
3.2. Pengadaan Gas dan Produksi Es	0,22	-4,03
<b>Total Sektor ESDM</b>	<b>11,77</b>	



# SERAPAN TENAGA KERJA 2017

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

Juta Pegawai



■ Pertambangan dan Penggalian

■ Listrik, Gas, dan Air

\*sumber, diolah dari: Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi, April 2018 - BPS

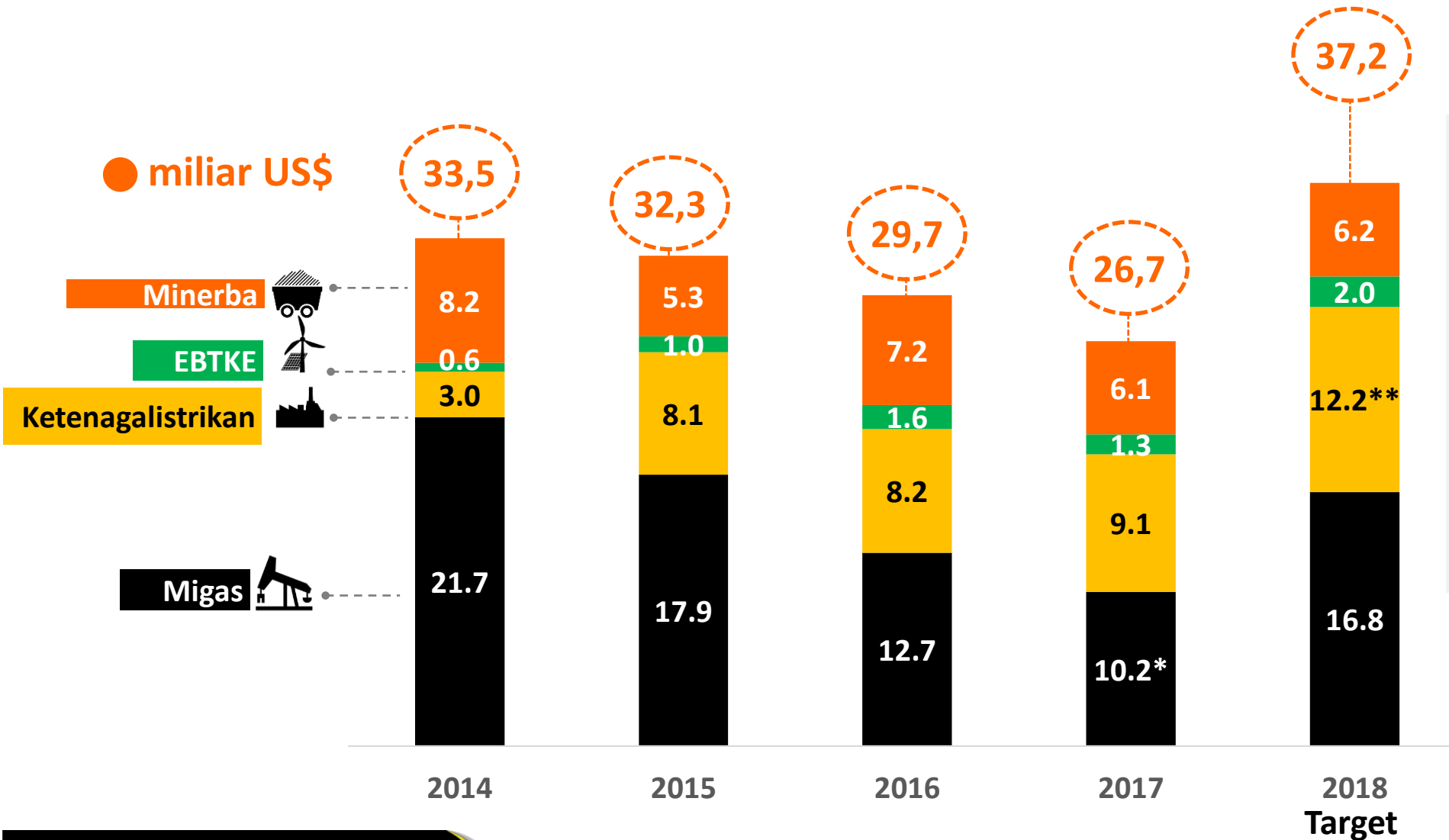


Total: 1.78 Juta orang Pegawai



# Target dan Realisasi Investasi

## Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral



### Pemerintah terus fokus pada:

- Menghapus Peraturan dan Perizinan yang menghambat Investasi
- Fasilitasi Investasi
- Mempercepat pengambilan keputusan strategis

\* Investastasi Hulu Migas US\$ 9.33

Investasi Hilir US\$ 0.85

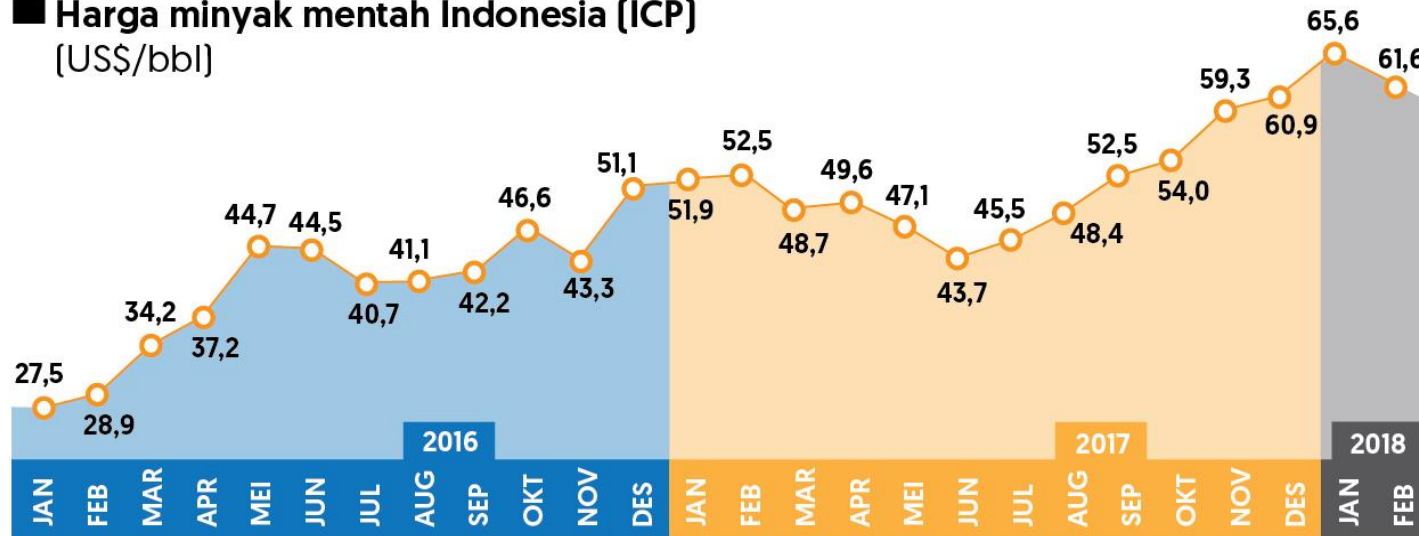
\*\* Sumber RUPTL 2018 - 2027



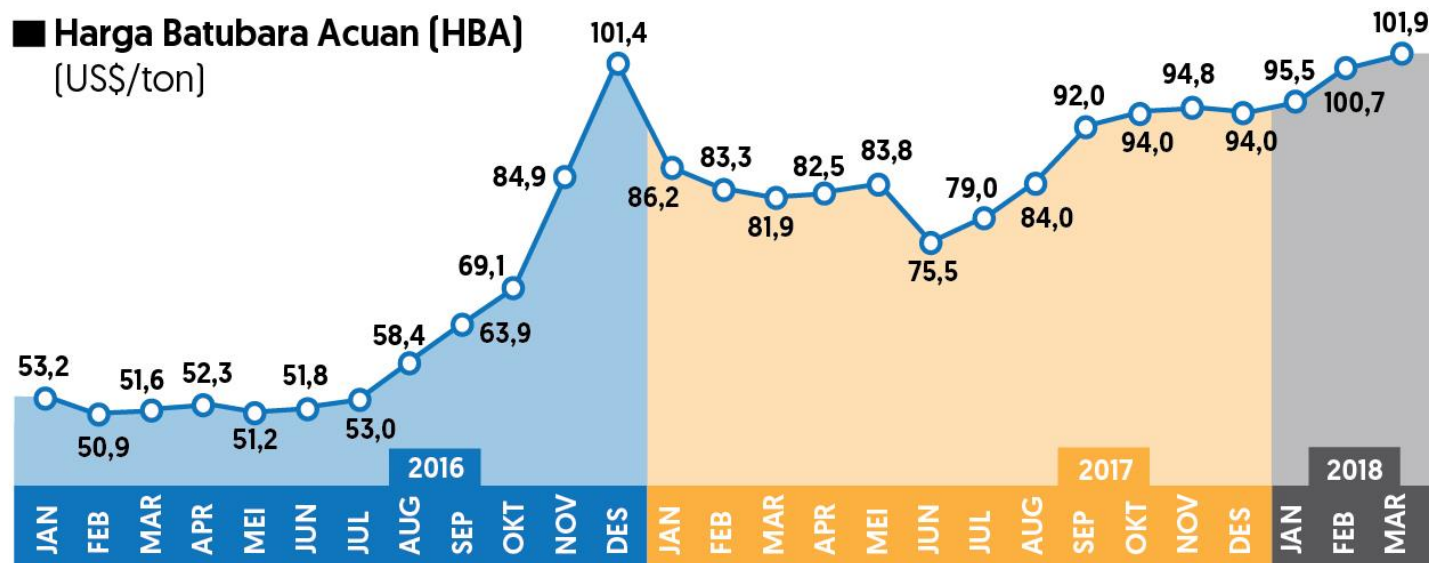
# TANTANGAN HARGA KOMODITI GLOBAL

Mitigasi dengan Policy Action yang Tepat

■ Harga minyak mentah Indonesia (ICP)  
[US\$/bbl]



■ Harga Batubara Acuan (HBA)  
[US\$/ton]



■ Melindungi daya beli rakyat:

Harga BBM & Listrik tidak naik, saat harga energy global tinggi

■ Kontrak Gross Split Migas lebih adil:

- Melindungi investor saat harga minyak rendah
- *Windfall* bagi Pemerintah saat harga minyak bagus

Harga jual batubara untuk pembangkit listrik untuk kepentingan umum ditetapkan

**US\$ 70 per ton**

(Kalori 6.322 GAR)

Jika di bawah harga tersebut, mengacu pada harga batubara acuan (HBA)

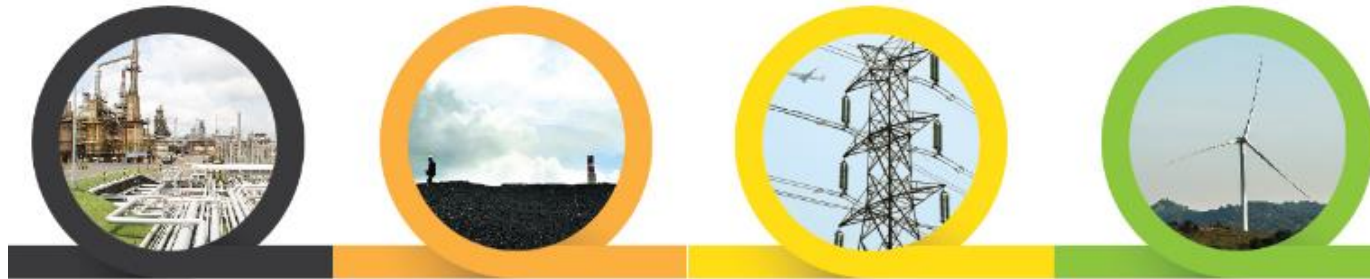
Agar tariff listrik tetap terjangkau,

Untuk melindungi daya beli masyarakat dan daya saing industri



# Perizinan dan Regulasi yang Menghambat Investasi terus Dipangkas

186 Perizinan/Sertifikasi Dicabut



Migas

Minerba

Ketenagalistrikan

EBTKE

ESDM

18 Peraturan

23 Perizinan

SKK Migas

12 Peraturan

BPH Migas

3 Peraturan

32 Peraturan

64 Perizinan

20 Peraturan

9 Peraturan

5 Perizinan

“ Sesuai Arahannya Presiden,  
Kita pangkas Perizinan dan Birokrasi untuk menciptakan iklim  
investasment friendly, mendukung pertumbuhan ekonomi dan  
menciptakan lapangan kerja”

**Ignasius Jonan**

Menteri Energi dan sumber Daya Mineral

## Periode Pencabutan

90 Peraturan

96 Perizinan (Sertifikat, Rekomendasi dll)

JAN

2018

11 Peraturan

Feb-I

2018

30 Peraturan

2 Perizinan

Feb-II

2018

45 Peraturan

72 Perizinan

Mar

2018

4 Peraturan

22 Perizinan

“ Deregulasi itu dampaknya  
mempermudah dan memangkas  
bisnis proses

**Arcandra Tahar**

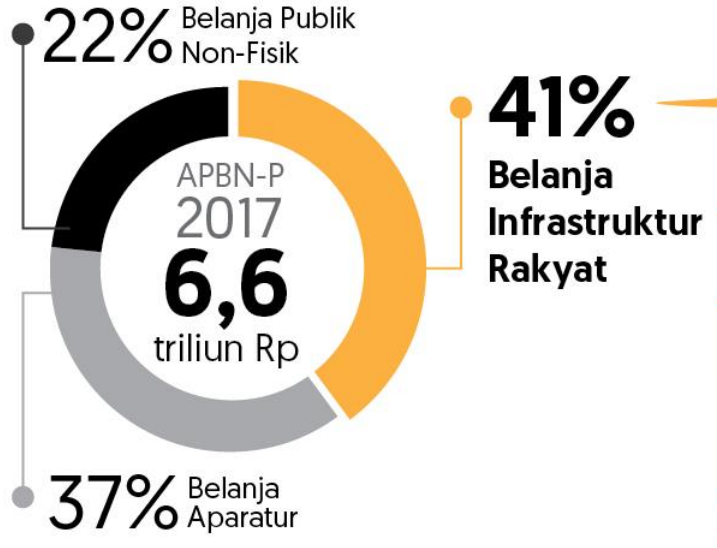
Wakil Menteri Energi dan sumber Daya Mineral





# Pertama kali 56% anggaran KESDM untuk Infrastruktur Rakyat

**NAIK ▲**  
menjadi  
**56%**  
lebih besar  
dari tahun 2017  
sebesar  
**41%**



dalam triliun rupiah

	APBNP 2017	APBN 2018
<b>Belanja Publik Fisik</b>	<b>2,73</b>	<b>3,68</b>
Belanja Aparatur	2,42	1,68
Belanja Publik Non-Fisik	1,42	1,14
<b>TOTAL</b>	<b>6,57</b>	<b>6,50</b>



**DARI RAKYAT  
KEMBALI KE RAKYAT**

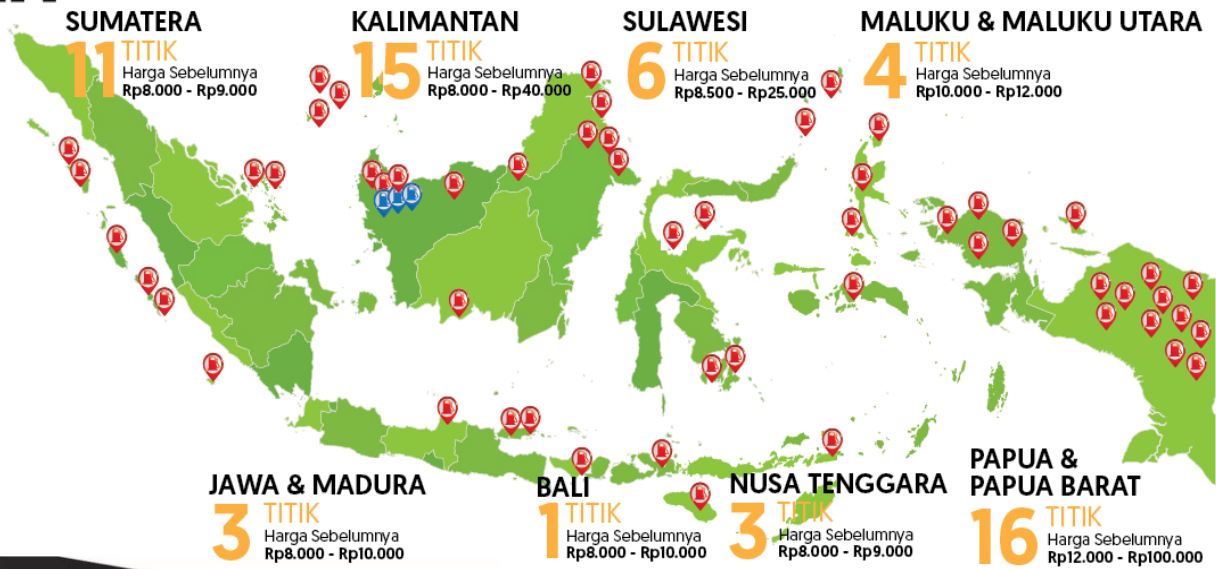
# YANG DULU MAHAL, KINI JADI MURAH

**HARGA JUAL BBM MENJADI:**  
**Rp. 5.150 | Rp. 6.450**  
**SOLAR PREMIUM**

**HARGA SEBELUMNYA:**  
 Kab. Puncak, Papua ↗ Rp 100.000  
 Nunukan, Kalimantan Utara ↗ Rp 40.000  
 Peg. Arfak, Papua Barat ↗ Rp 30.000

**REALISASI  
 BBM SATU HARGA  
 s.d Maret 2018**

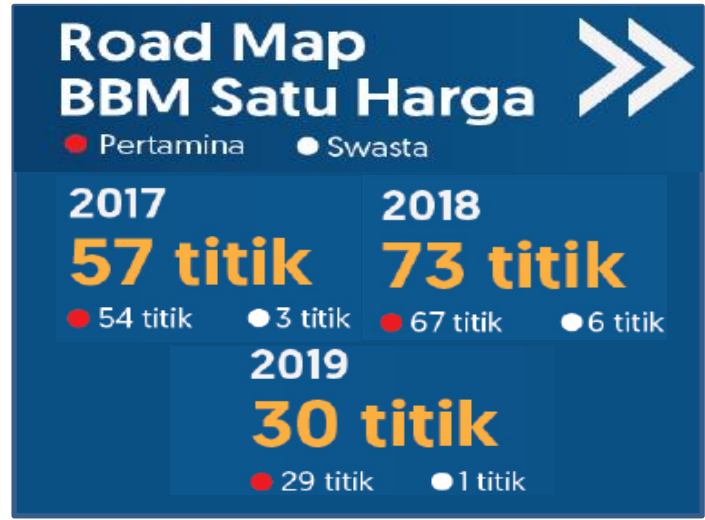
**59  
 Titik**



## Lokasi 59 Titik Lembaga Penyalur yang Telah Beroperasi

No. Kab/Kota	Provinsi	No. Kab/Kota	Provinsi	No. Kab/Kota	Provinsi	No. Kab/Kota	Provinsi
1. Puncak	Papua	16. Sumenep	Jatim	31. Natuna	Kepri	46. Kapuas Hulu	Kalbar
2. Nduga	Papua	17. Mahakam Hulu	Kaltim	32. Nias Barat	Sumut	47. Wakatobi	Sultra
3. Yalimo	Papua	18. Sorong Selatan	Pabar	33. Bengkulu Utara	Bengkulu	48. Berau	Kaltim
4. Mamberamo Raya	Papua	19. Morotai	Malut	34. Berau	Kaltim	49. Berau	Kaltim
5. Mamberamo Tengah	Papua	20. Paniai	Papua	35. Belu	NTT	50. Sumenep	Jatim
6. Intan Jaya	Papua	21. Bengkayang	Kalbar	36. Kep. Mentawai	Sumbar	51. Anambas	Kepri
7. Pegunungan Arfak	Pabar	22. Kep. Talaud	Sulut	37. Peg. Bintang	Papua	52. Bintan	Kepri
8. Tolikara	Papua	23. Seruyan	Kalteng	38. Tojo Una-una	Sulteng	53. Natuna	Kepri
9. Nunukan	Kaltara	24. Halmahera Selatan	Malut	39. Bovendigoel	Papua	54. Natuna	Kepri
10. Nias Selatan	Sumut	25. Seram Bagian Barat	Maluku	40. Sambas	Kalbar	55. Bengkayang*	Kalbar
11. Kep. Mentawai	Sumbar	26. Sambas	Kalbar	41. Supiori	Papua	56. Sanggau*	Kalbar
12. Sumbawa	NTB	27. Kep. Talaud	Sulut	42. Sorong Selatan	Pabar	57. Ketapang*	Kalbar
13. Sumba Timur	NTT	28. Klungkung	Bali	43. Halmahera Tengah	Malut	58. Nunukan	Kaltara
14. Wakatobi	Sultra	29. Tambrau	Pabar	44. Waropen	Papua	59. Banggai Kepulauan	Sulteng
15. Jepara	Jateng	30. Natuna	Kepri	45. Bulungan	Kaltara		

\*1 dibangun oleh AKR [www.esdm.go.id](http://www.esdm.go.id)



# KONVERTER KIT BBM KE LPG UNTUK NELAYAN

- Mengurangi biaya operasional Rp. 30.000 – Rp. 50.000/hari
- Mengurangi konsumsi BBM, energi jadi lebih bersih dan aman

## RENCANA 2018

# 25.000<sup>Unit</sup>

## di 58 Kab/Kota



Realisasi 2017  
**17.081<sup>Unit</sup>**  
di 28 KAB/KOTA

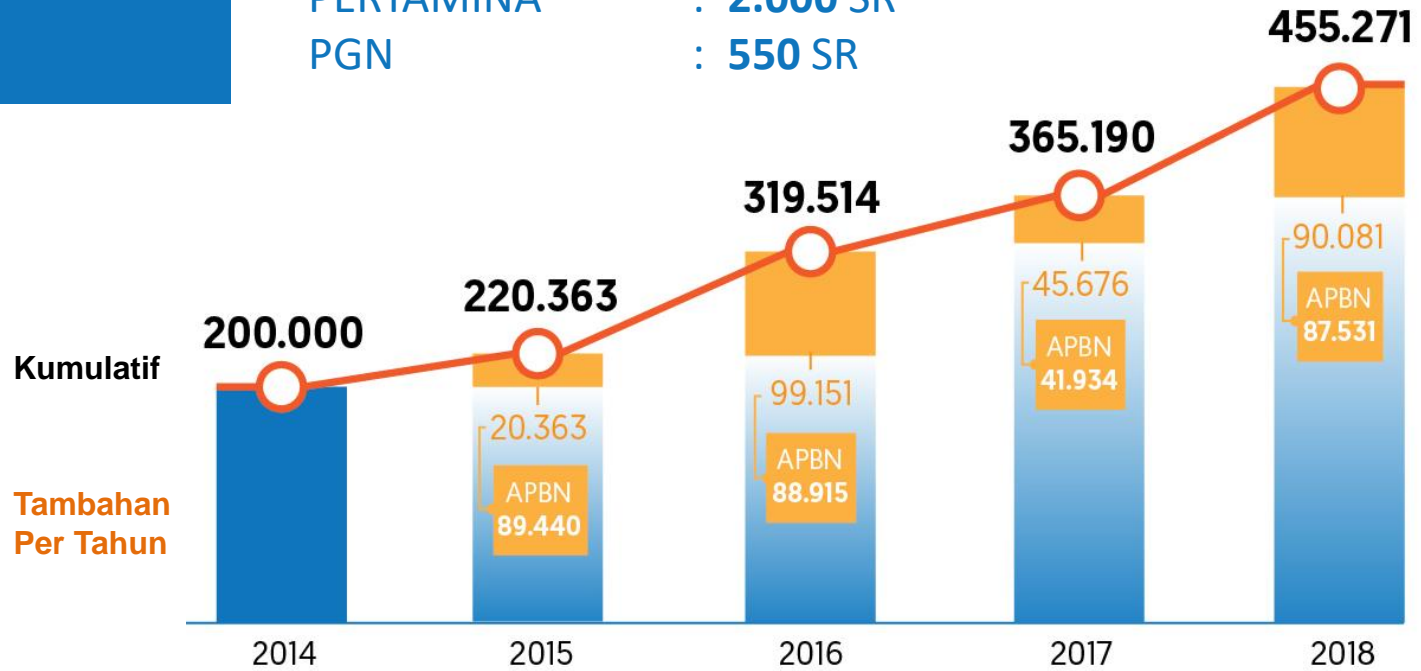
1. Kab. Pasaman Barat
2. Kota Padang
3. Kab. Gorontalo
4. Kab. Lombok Barat
5. Kab. Lombok Timur
6. Kab. Sukabumi
7. Kab. Tuban
8. Kab. Pati
9. Kab. Banyuwangi
10. Kab. Pasuruan
11. Kab. Probolinggo
12. Kota Makassar
13. Kab. Cilacap
14. Kab. Demak
15. Kab. Maros
16. Kab. Jeneponto
17. Kab. Soppeng
18. Kab. Pemalang
19. Kab. Pekalongan
20. Kab. Mamuju
21. Kab. Jembrana
22. Kab. Malang
23. Kab. Labuhan Batu
24. Kab. Agam
25. Kota Surabaya
26. Kab. Lamongan
27. Kab. Jepara
28. Kab. Cirebon



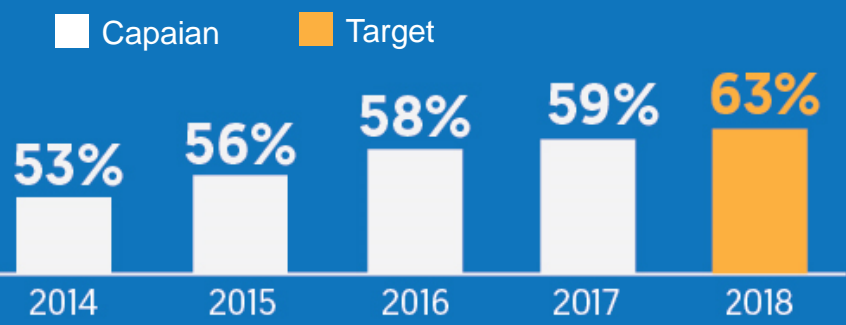
# PEMBANGUNAN JARINGAN GAS KOTA (JARGAS)

## Tahun 2018

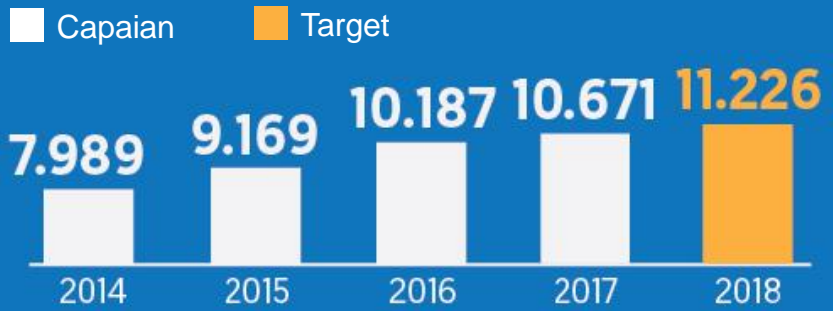
APBN : 87.531 SR  
 PERTAMINA : 2.000 SR  
 PGN : 550 SR



## ALOKASI GAS DOMESTIK (%)



## PIPA GAS (KM)



Kapasitas Terpasang

## MANFAAT JARINGAN GAS UNTUK RUMAH TANGGA

- Mengurangi biaya rumah tangga sekitar **Rp. 90.000** per bulan per keluarga
- Lebih praktis, bersih, dan aman dibandingkan tabung LPG 3 kg

# LIFTING

## Minyak dan Gas Bumi

Capaian *lifting* migas sebesar **1.944** ribu BOEPD, atau **98,9%** dari Target APBNP 2017 sebesar **1.965** ribu BOEPD

### Upaya mengejar realisasi *Lifting Migas*:

- Mendorong percepatan kegiatan eksplorasi dan penyelesaian proyek pengembangan lapangan;
- Melakukan pemeliharaan untuk meningkatkan kehandalan fasilitas produksi untuk meminimalkan *unplanned shutdown*;
- Mendorong KKKS untuk menambah investasi dalam kegiatan eksploitasi seperti pemboran dan *workover*;
- Melakukan optimalisasi stok minyak untuk di *lifting*;
- Mempercepat penyelesaian masalah non-teknis (perizinan, lahan, dll)

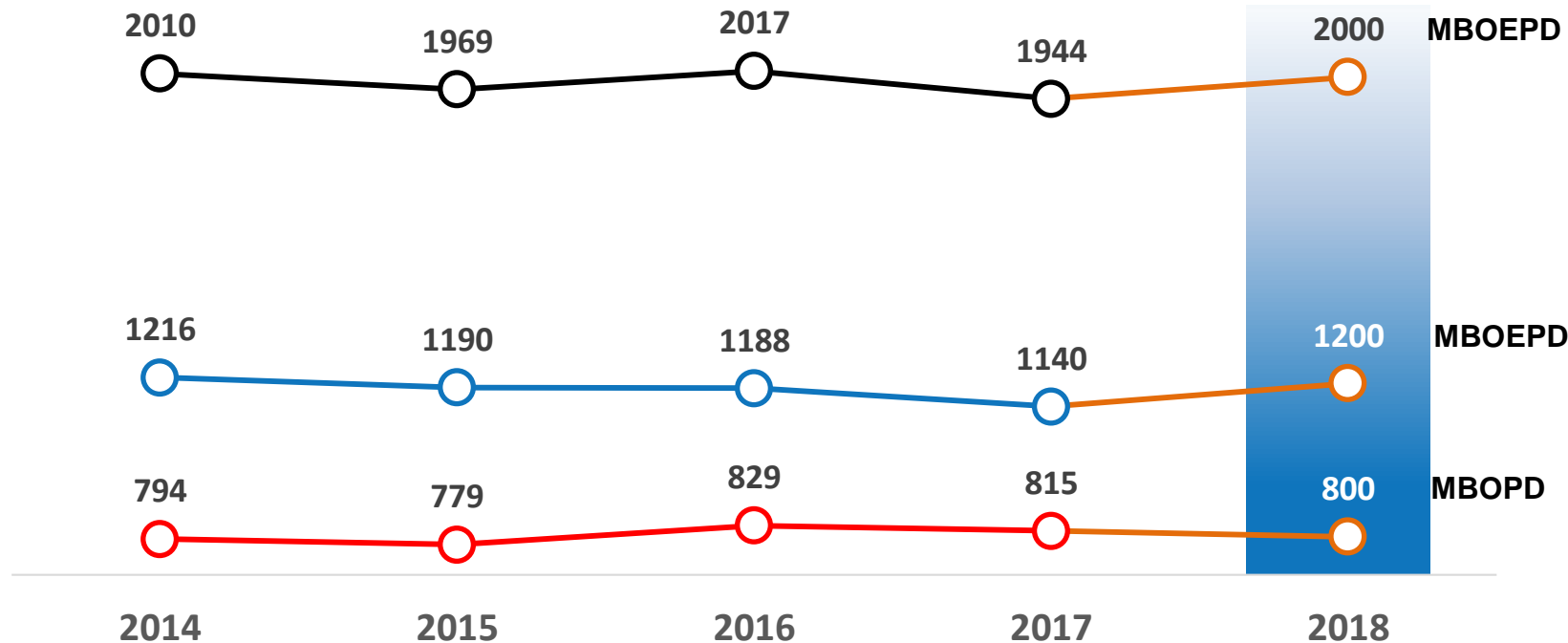
#### Minyak Bumi

ribu barrel oil per day (bopd)

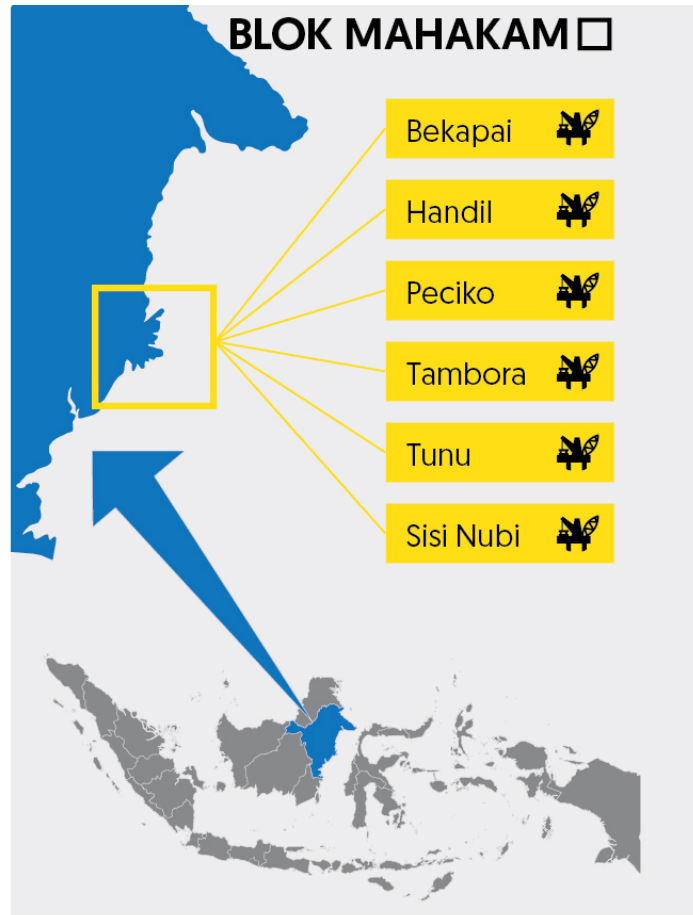
#### Gas Bumi

ribu barrel oil equivalent per day (boepd)

○ Gas Bumi    ○ Minyak Bumi    ○ Total



# PEMERINTAH AMBIL ALIH PENGELOLAAN BLOK MAHAKAM



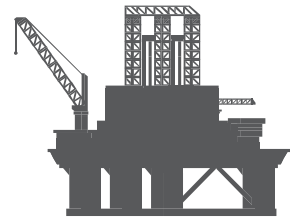
Setelah 50 tahun lebih dikelola oleh Total E&P, per 1 Januari 2018, Blok Migas terbesar Indonesia dikelola oleh Pertamina.

## Peningkatan Peran Nasional dan Daerah

- Pertamina dan daerah harus menguasai minimal 61% saham.
- Meningkatkan penerimaan Negara.
- Proses transisi pengelolaan Wilayah Kerja Mahakam telah disiapkan sejak 2015.



# Perkembangan Proyek Migas Strategis



## JANGKRIK



- Proyek Migas laut dalam (deep water) Indonesia
- Beroperasi Mei 2017 → Lebih cepat dari target (juni 2017)
- **Produksi gas 450 mmscfd dan bisa ditingkatkan hingga 600 mmscfd**
- Investasi US\$ 5,9 Miliar

## JAMBARAN TIUNG BIRU



- Grounbreaking 25 September 2017 setelah lama menggantung
- **Efisiensi investasi dari US\$ 2,1 Miliar menjadi US\$ 1,5 Miliar**
- Penjualan gas 172 mmscfd, disalurkan untuk pembangkit listrik dan industry di Jateng dan Jatim
- Harga Jual gas US\$ 7,6/MMBTU (Flat)
- Menyerap 6000 Tenaga kerja

## MASELA



- Keputusan pengembangan di *onshore* (setelah lama menggantung)
- Mendorong perekonomian wilayah setempat (Industri Petrokimia)
- **Upaya efisiensi investasi menjadi sekitar US\$ 15,5 Miliar**
- Sedang melakukan PreFEED untuk penentuan Kapasitas Fasilitas offshore & Darat (onshore) LNG 9,5/7,5 MTPA dan Gas Pipa 150 MMSCFD



# PERKEMBANGAN PENAWARAN BLOK MIGAS SKEMA GROSS SPLIT



Tahun 2015 dan 2016  
lelang blok migas

**SKEMA COST RECOVERY  
TIDAK ADA YANG LAKU**

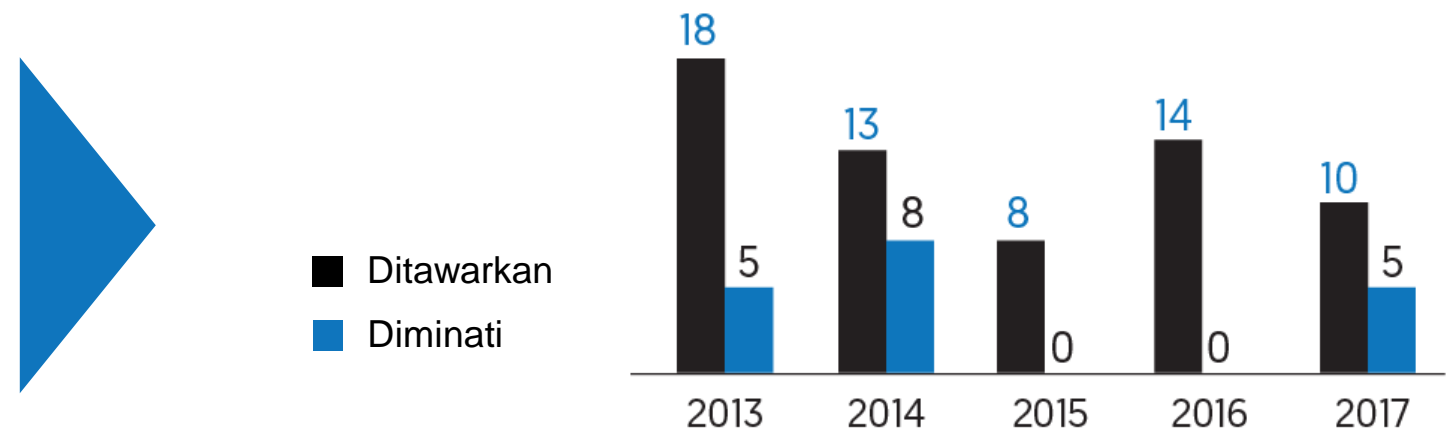
## ■ Lelang Blok Migas 2017 (Gross Split) Diminati Investor

Blok Migas	Pemenang
Andaman I	Mubadala Petroleum Ltd
Andaman II	Konsorsium Premier Oil Far East Ltd – KrissEnergy – Mubadala Petroleum Ltd
Merak – Lampung	PT Tansri Madjid Energi
Pekawal	PT Saka Energi Sepinggan
Wet Yamdena	PT Saka Energi Indonesia

## ■ Lelang Blok Migas 2018 (Gross Split)

- ✓ 24 Blok Konvensional
- ✓ 2 Blok Non Konvensional

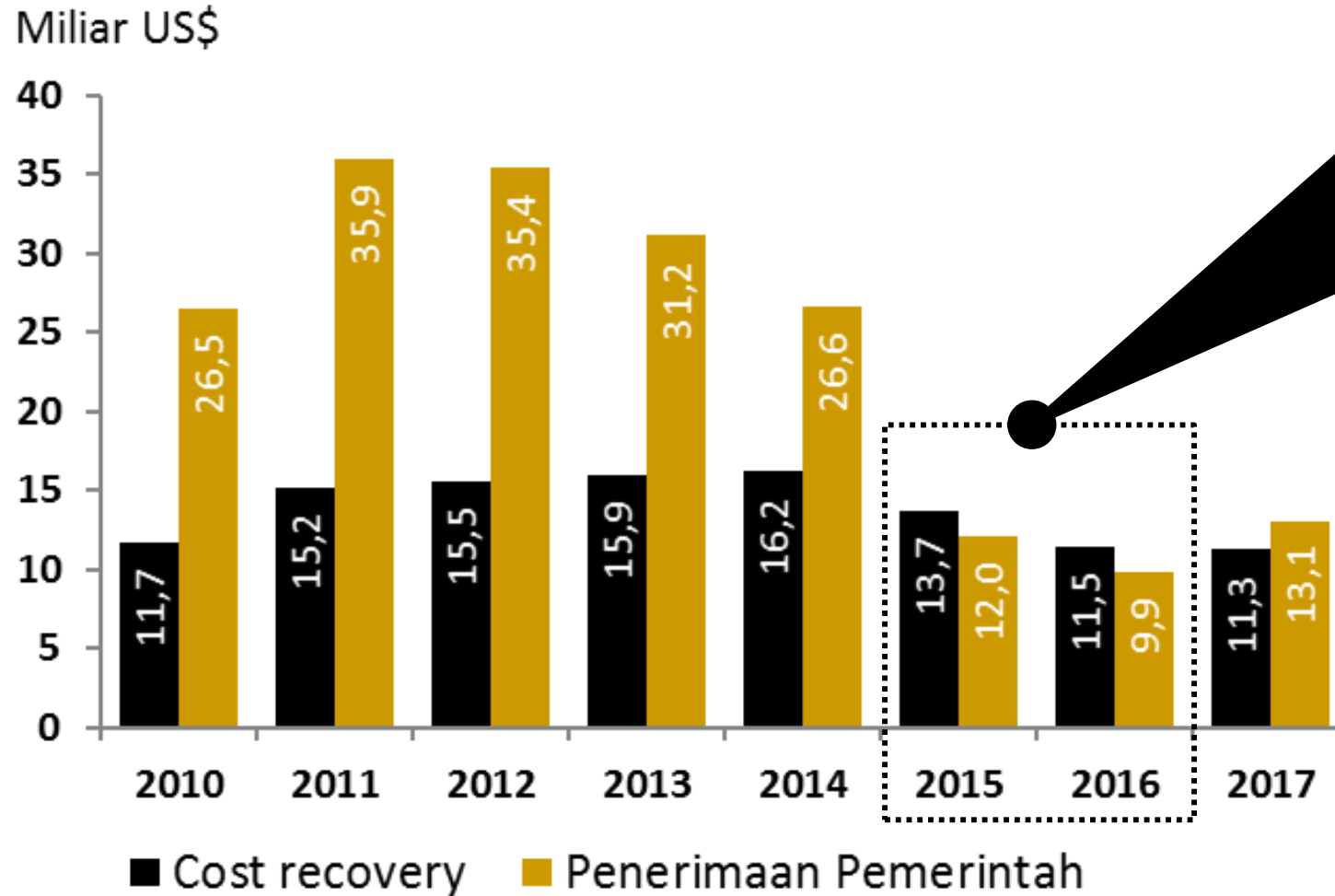
## ■ Lelang Blok Migas Konvensional





# Penerimaan Pemerintah VS Cost Recovery

Inefisiensi kontraktor dapat mengganggu APBN



Pertama kali dalam sejarah migas Indonesia, *cost recovery* lebih besar dari penerimaan pemerintah

“

Upaya Pemerintah mendorong efisiensi biaya operasi pada tahun 2017 mulai terlihat

# 1 INSENTIF PAJAK PSC COST RECOVERY

KEGIATAN EKSPLORASI MIGAS  
**BEBAS PAJAK**

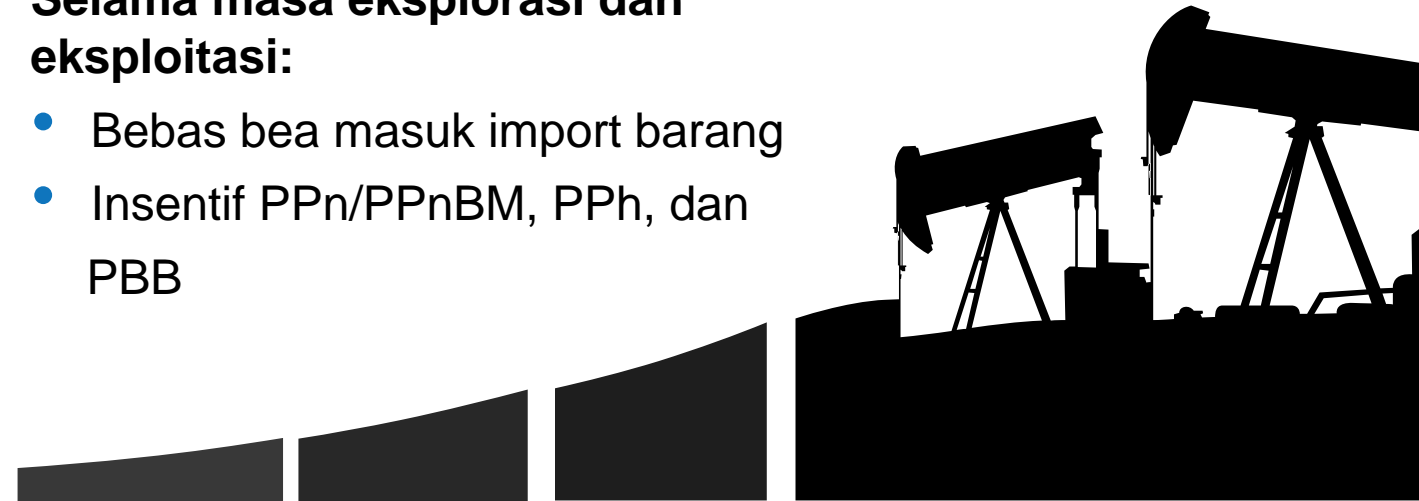
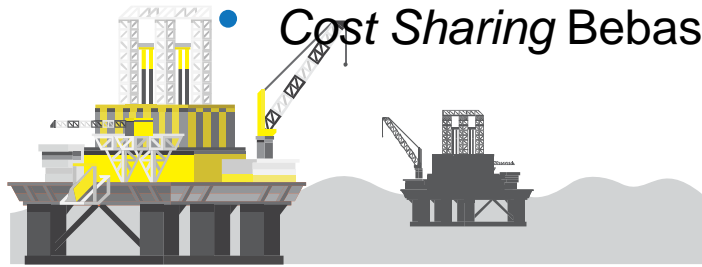
## PP No.53/2017

### Insentif Hulu

- Investment Credit, *Domestic Market Obligation* (DMO) holiday, depresiasi dipercepat.
- *Cost Sharing* Bebas PPh dan PPn

### Selama masa eksplorasi dan eksploitasi:

- Bebas bea masuk import barang
- Insentif PPn/PPnBM, PPh, dan PBB



# 2 INSENTIF PAJAK PSC COST RECOVERY

## PP No.53/2017

- Tidak ada pengenaan pajak dari tahapan ekplorasi hingga first production
- Loss carry forward hingga 10 tahun
- Depresiasi dipercepat
- Pengenaan indirect tax pada masa produksi diperhitungkan di dalam keekonomian lapangan yang akan dikompensasi melalui split adjustment



# PENERIMAAN NEGARA

SUB SEKTOR

# MIGAS

MELEBIHI TARGET

[unaudited]

Tembus **Rp.138T**

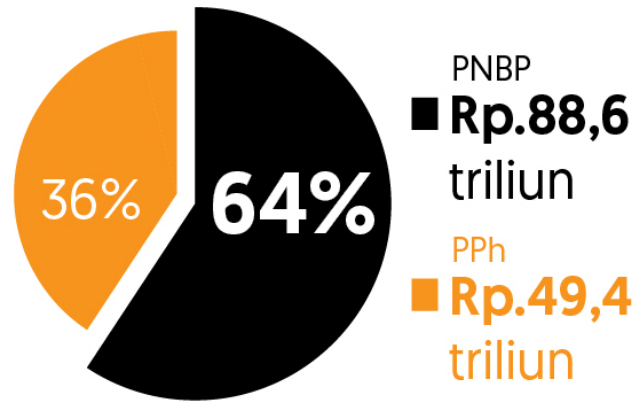
(triliun)

**117%** dari target APBN-P 2017

sebesar **Rp.118 T**

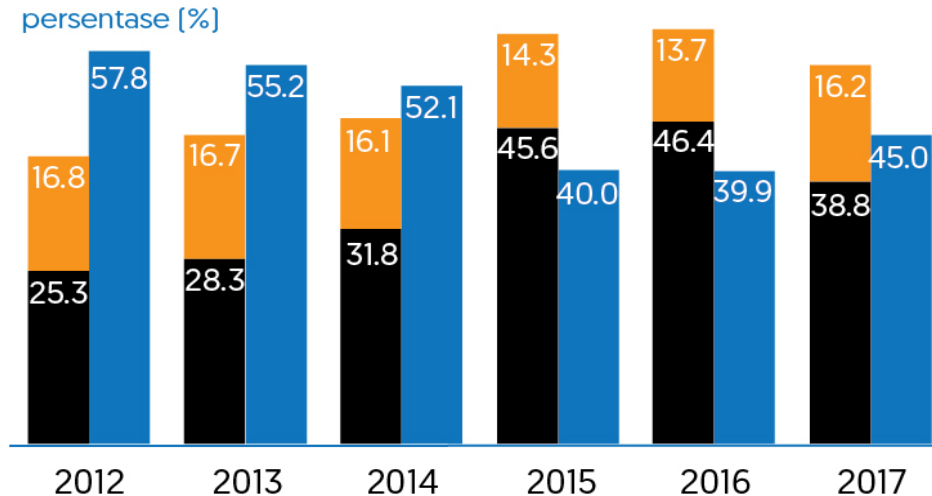


## KOMPOSISI PENERIMAAN MIGAS TAHUN 2017



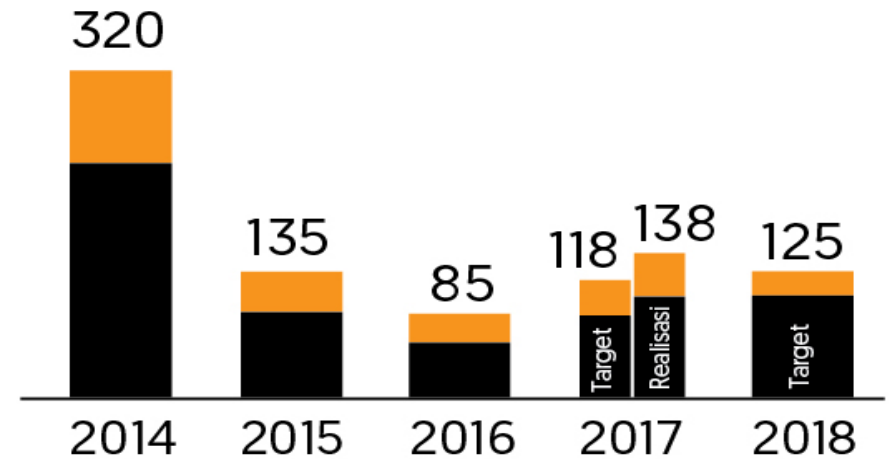
## Penerimaan Negara vs Penerimaan Kontraktor vs Cost Recovery

- penerimaan bagian pemerintah
- penerimaan bagian KKKS
- Cost Recovery



## Penerimaan Migas (Rp triliun)

■ PNBP ■ PPh



Sejak tahun 2015, proporsi *cost recovery* lebih besar dari penerimaan negara. Setelah dilakukan peningkatan evaluasi WP&B dan pengawasan serta efisiensi di beberapa proyek migas, **maka pada tahun 2017 penerimaan bagian negara lebih besar USD 1,8 miliar dibanding *cost recovery*.**



# Peningkatan Rasio Elektrifikasi

Dengan Peningkatan Melistriki Desa dan Akomodasi Kearifan Lokal



## Meningkatkan Rasio Elektrifikasi

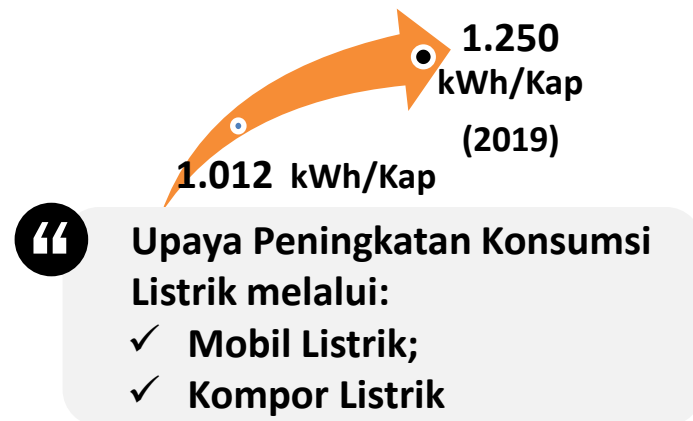


2014	84,4%
2015	88,3%
2016	91,16%
2017	95,35% (Target 92,75%)
2018	97,5% (Target)

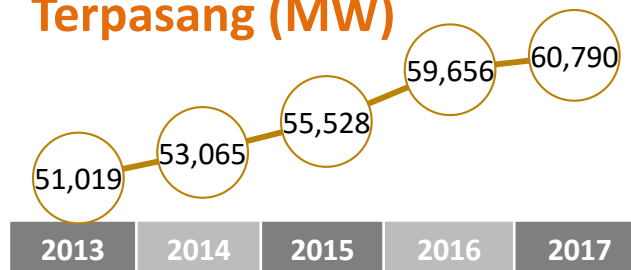
“ Terdapat 2.519 desa yang listriknya belum masuk sama sekali, kita akan fokus kesana, karena pemerataan itu penting

-Ignasius Jonan-

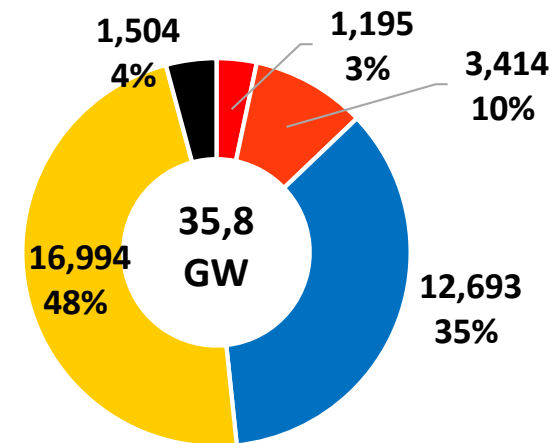
## Konsumsi Listrik Per Kapita



## Kapasitas Pembangkit Listrik Terpasang (MW)



## Capaian Program 35 GW



■ COD/komisioning	: 1.504 MW
■ Konstruksi	: 16.994 MW
■ PPA (belum konstruksi)	: 12.693 MW
■ Pengadaan	: 3.414 MW
■ Perencanaan	: 1.195 MW

Status 15 Maret 2018

## Percepatan Elektrifikasi Perdesaan (Permen ESDM No. 38/2016)

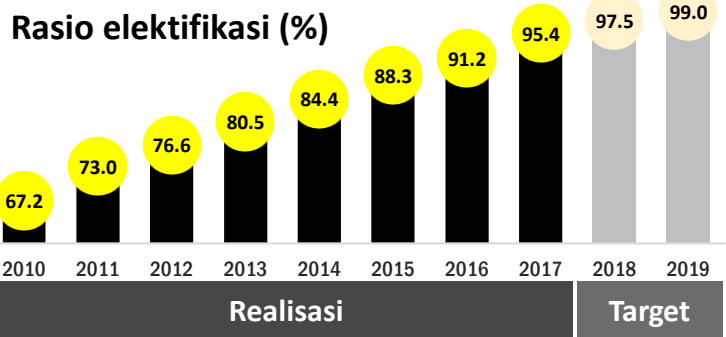
Penyediaan listrik (utamanya berbasis Energi Baru Terbarukan) kapasitas <50 MW bagi desa belum berkembang, desa terpencil, perdesaan perbatasan, dan pulau kecil berpenduduk yang belum memiliki akses listrik.



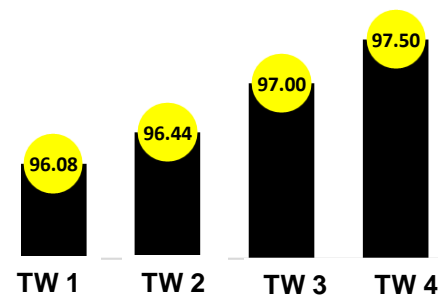
# MENINGKATKAN RASIO ELEKTRIFIKASI

**95,35%**

Realisasi 2017  
(Target 92,75%)



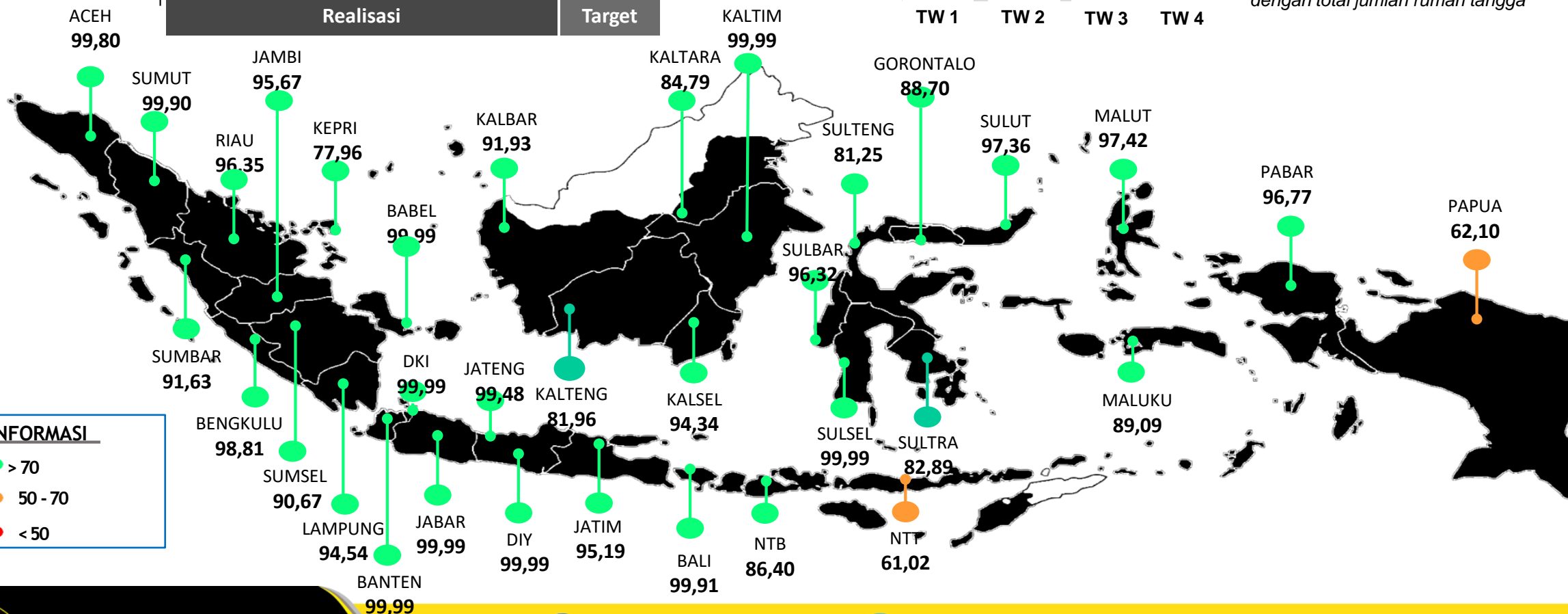
## Target Rasio Elektrifikasi per-Triwulan 2018



**Nasional: 97,50%**

Note:

<sup>1)</sup> Rasio Elektrifikasi adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga berlistrik dengan total jumlah rumah tangga

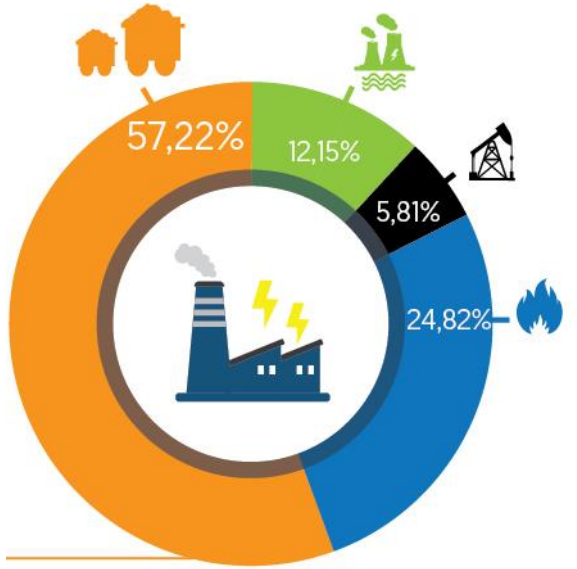
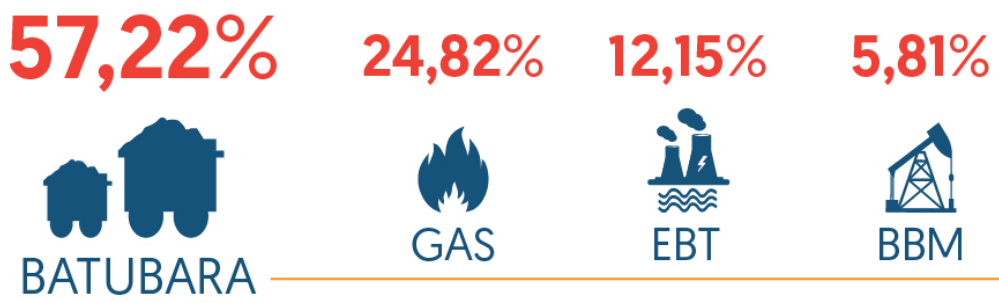


### INFORMASI

- > 70
- 50 - 70
- < 50

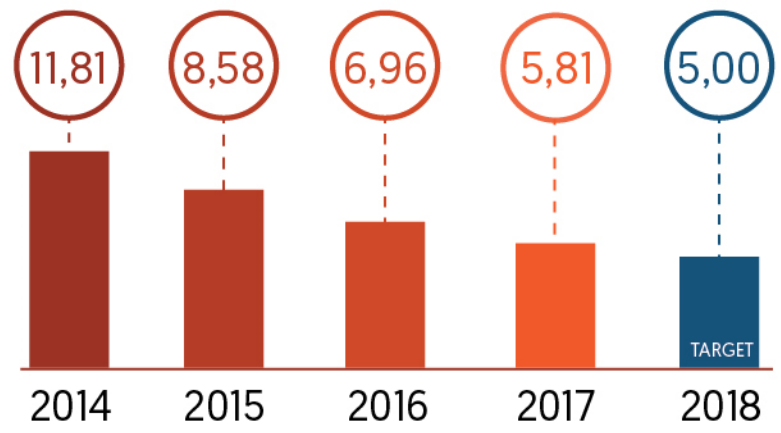


# BAURAN PEMBANGKIT PRIMER PEMBANGKIT LISTRIK 2017



## PANGSA BBM PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK (%)

Porsi BBM menurun seiring dengan peningkatan porsi energy terbarukan



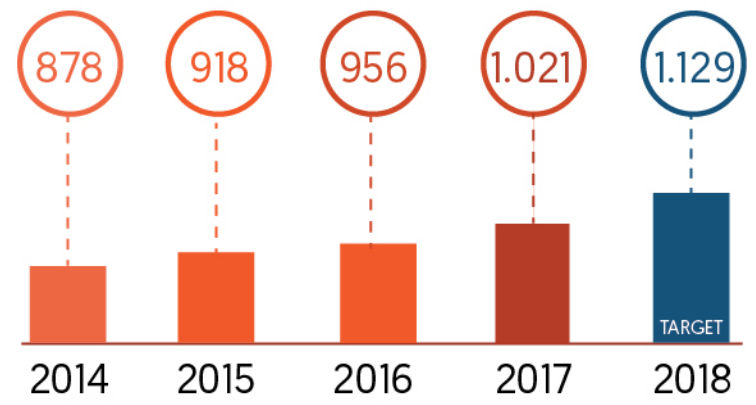
## SUSUT JARINGAN (%)

- ✓ Penigkatan pengawasan untuk mencegah pencurian listrik
- ✓ Modernisasi system penyaluran dan meeting



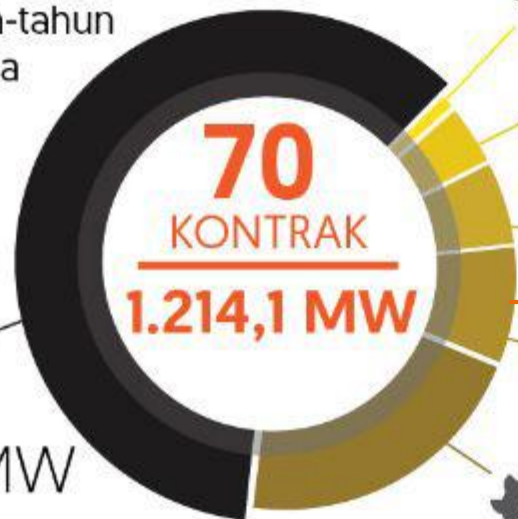
## KONSUMSI LISTRIK (kWh/Kapita)

- ✓ Konsumsi listrik terus meningkat seiring peningkatan akses/elektrifikasi dan pertumbuhan ekonomi
- ✓ Mendorong pengembangan kendaraan listrik dan kompor listrik



# 70 KONTRAK ENERGI BARU TERBARUKAN DITANDATANGANI TAHUN 2017

■ Belum pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya



Air **754MW**  
[62%]

Biogas **9,8MW**  
[1%]  
Biomassa **32,5MW**  
[3%]  
Surya **45MW**  
[4%]  
Panas Bumi **86MW**  
[7%]  
Minihidro **286,8MW**  
[23%]

**3**  
Kontrak telah COD

**22**  
Kontrak Tahap Konstruksi

## ■ PENANDATANGANAN 70 KONTRAK PEMBANGKIT LISTRIK EBT TAHUN 2017

## ■ KEMAJUAN KONTRAK PEMBANGKIT LISTRIK EBT (2014-2017)



# 165 MW TAMBAHAN KAPASITAS TERPASANG PEMBANGKIT PANAS BUMI

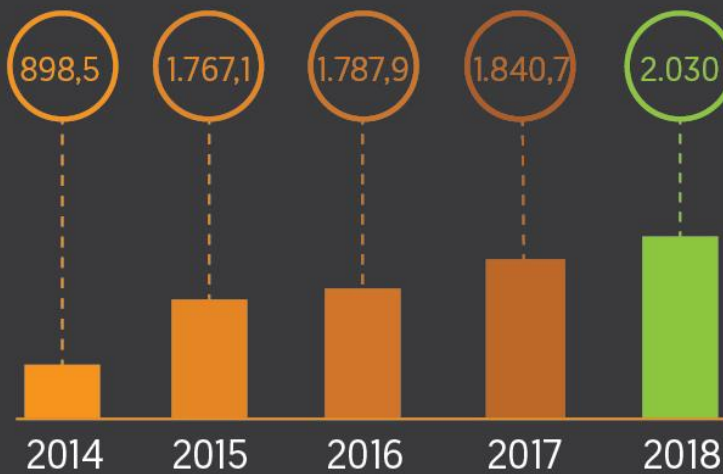
Tambahan kapasitas terpasang tahun 2017 dari PLTP Ulubelu #4 [55 MW] dan PLTP Sarulla #2 [110 MW]



### KAPASITAS TERPASANG PLTS & PLTM/MH (MW)

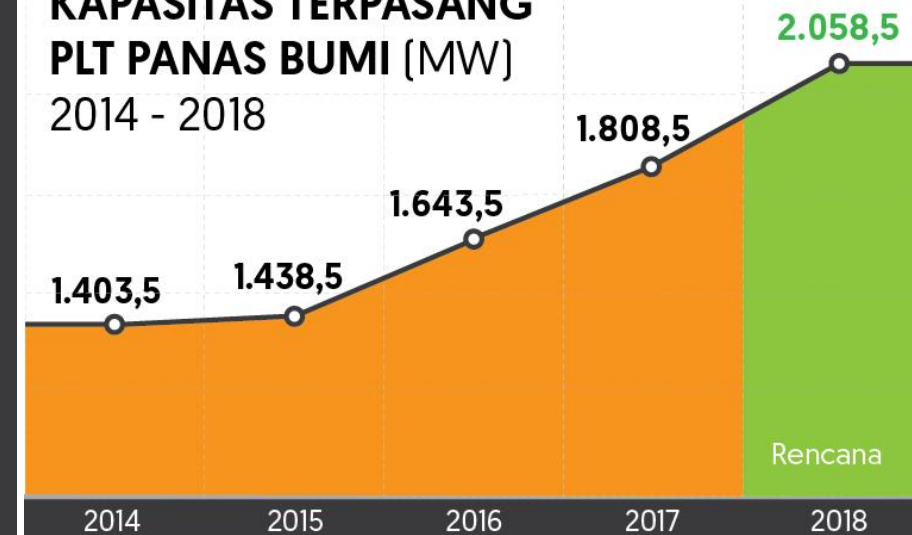


### KAPASITAS TERPASANG PLT BIOENERGI (MW)



### KAPASITAS TERPASANG PLT PANAS BUMI (MW)

2014 - 2018

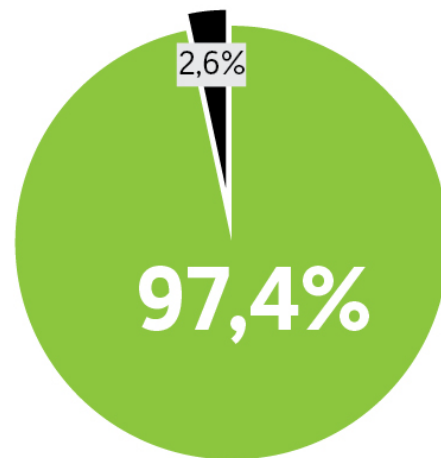




# PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SUB SEKTOR EBTKE MELEBIHI TARGET

## Komposisi Penerimaan Panas Bumi 2017

Penerimaan negara dari Panas Bumi mencapai **Rp.933 M** s.d akhir 2017  
**139% target APBN-P 2017** sebesar **Rp.671 M**

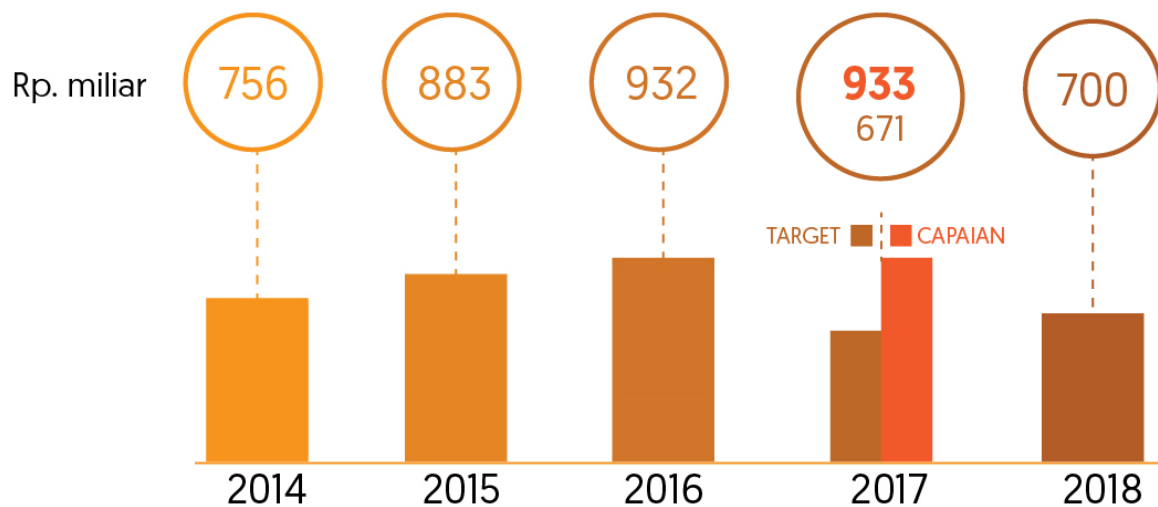


WKP Eksisting  
**Rp.909 miliar**

WKP IPB  
**Rp.24 miliar**

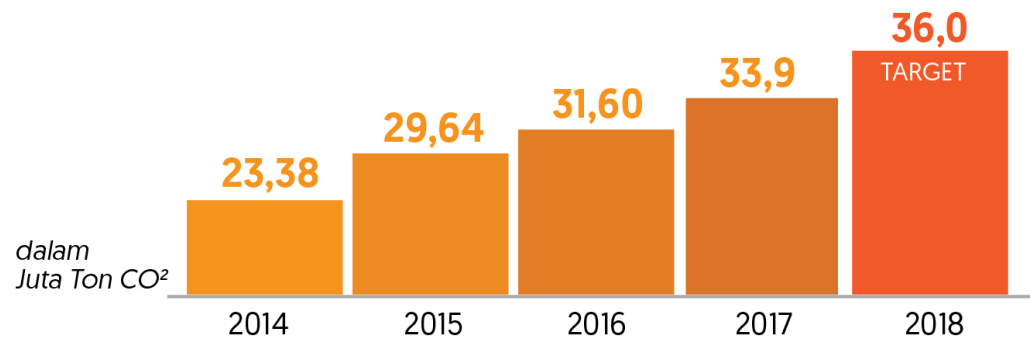
### Sumber penerimaan:

Iuran tetap eksplorasi, iuran tetap produksi, royalti produksi, bonus produksi panas bumi



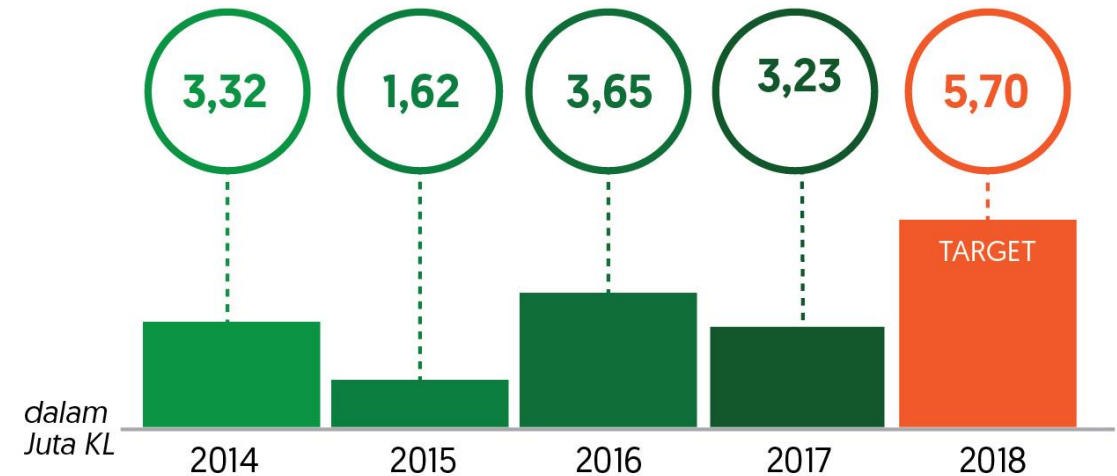
# Pemanfaatan EBT Mendorong Penurunan Emisi CO<sub>2</sub>

## PENURUNAN EMISI CO<sub>2</sub> | Juta Ton CO<sub>2</sub>



Sebagai komitmen nasional dalam penurunan emisi (sesuai UU No.16/2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to UNFCCC dan Perpres No.61/2011 tentang RAN-GRK)

## BAHAN BAKAR NABATI (BBN) (Juta KL)



### Produksi BBN

- Kebijakan mandatori campuran BBN ke BBM sebesar 20% (B20) sejak tahun 2016
- Tantangan pengembangan BBN: Rendahnya harga minyak dunia, menyebabkan selisih harga BBN & BBM tinggi
- Diberikan insentif melalui BPDP Kelapa Sawit

# LAMPU TENAGA SURYA HEMAT ENERGI

2.519 Desa pada Tahun 2019

HASIL PADA 2017

Menerangi 79.564 \*) rumah di 5 Provinsi

TARGET PADA 2018

Menerangi 175.782 rumah di 15 Provinsi

\*) sesuai kontrak



Solar Panel dengan 4 Lampu LED dan Port USB, memberi manfaat yang besar pada Remote Area

## Spesifikasi LTSHE

1. Ultra Efficient Light Emitting Diode (LED) 3 Watt = Lampu Pijar 25 Watt
2. Lithium Energy Storage Pack (Lithium Battery)
3. Chip Management Energy

Dapat menyala hingga 6 jam, 12 jam, atau dapat beroperasi maksimum hingga 60 jam dalam 1 kali pengisian



Teloh dipasang di 5 provinsi

Akan dipasang di 15 provinsi





## Ibu YAKON TABONI

Warga Desa Munak,  
Distrik Bolakme, Kabupaten  
Jayawijaya, Papua

BAHAGIA SETELAH  
MENERIMA BANTUAN  
LTSHE DARI  
PEMERINTAH

- 20 Desember 2017 -





## DESA AOU

Kecamatan Pulau Tiga,  
Kabupaten Asmat, Papua

SEKARANG TELAH  
100% (PRA) ELEKTRIFIKASI  
DENGAN LTSHE





## ILPEN TABONI

Warga Desa Nunggu Rugu,  
Distrik Bolakme, Kabupaten  
Jayawijaya, Papua

KINI, SAYA  
BISA BELAJAR  
DI MALAM HARI

- 20 Desember 2017 -

# LANDMARK PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA

## Hilirisasi Mineral untuk Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat



Divestasi Saham harus mencapai 50%



Mendorong percepatan pembangunan smelter



Menjamin peningkatan penerimaan negara



Kepastian masa operasi

## REGULASI MINERBA

### PP Nomor 8/2018 jo PP Nomor 1/2017

Tentang Perubahan Kelima atas PP No.23/2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

- Divestasi saham hingga 51% secara bertahap;
- Penetapan harga untuk penjualan mineral dan batubara;
- KK hanya boleh mengekspor hasil pemurnian;
- Waktu permohonan perpanjangan IUP/IUPK lebih awal, untuk memberikan kepastian investasi (5 tahun sebelum izin berakhir).

### Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2017

Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri

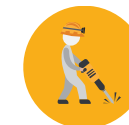
- Pemegang IUP OP, IUPK OP, IUP Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian wajib melakukan pengolahan dan pemurnian;
- Melakukan penjualan hasil pemurnian ke luar negeri setelah memenuhi batasan minimum pemurnian;
- Dapat menjual konsentrat selama 5 tahun dengan syarat:
  - 1) Telah atau sedang membangun smelter;
  - 2) Membayar bea keluar;
  - 3) Bentuk pengusahaannya wajib IUPK OP

### Permen ESDM Nomor 35 Tahun 2017

Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian

Wajib mendapatkan rekomendasi sebelum memperoleh persetujuan ekspor dengan syarat:

- Komitmen membangun smelter dalam 5 tahun;
- Evaluasi tiap 6 bulan oleh verifikator independen;
- Sanksi pencabutan rekomendasi jika tidak memenuhi komitmen;
- Surat keterangan pelunasan kewajiban pembayaran
- PNPB selama 1 tahun terakhir dari Ditjen Minerba



Terciptanya lapangan kerja bagi rakyat Indonesia



Pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional



Peningkatan peran nasional dalam pengusaha tambang



Iklim investasi usaha yang kondusif



Peningkatan harga jual produk mineral pemurnian



# REGULASI SUBSEKTOR MINERAL DAN BATUBARA TAHUN 2017

Melaksanakan amanat Undang-undang Mineral dan Batubara (UU No.4/2009)



## Regulasi

Yang memastikan implementasi hilirisasi mineral dan meningkatkan peran nasional

**PP No.1 Tahun 2017**



### Permen ESDM No.05 & No.28 Tahun 2017

Mengatur ketentuan mengenai peningkatan nilai tambah melalui pengolahan dan pemurnian mineral



### Permen ESDM No.06 & No.35 Tahun 2017

Mengatur ketentuan mengenai syarat dan tata cara Pelaksanaan Penjualan Mineral ke luar negeri



### Permen ESDM No.09 Tahun 2017

Mengatur ketentuan mengenai syarat dan tata cara Pelaksanaan Divestasi dan Harga Saham



### Permen ESDM No.15 Tahun 2017

Mengatur ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian IUPK sebagai Kelanjutan KK/PKP2B



### Permen ESDM No.34 Tahun 2017

Mengatur bentuk perizinan minerba beserta dengan ketentuan hak, kewajiban, dan tata cara pemberian perizinan



### Permen ESDM No.07 & No.44 Tahun 2017

Mengatur tata cara penetapan Harga Patokan Mineral dan Batubara



### Permen ESDM No.42 & No.48 Tahun 2017

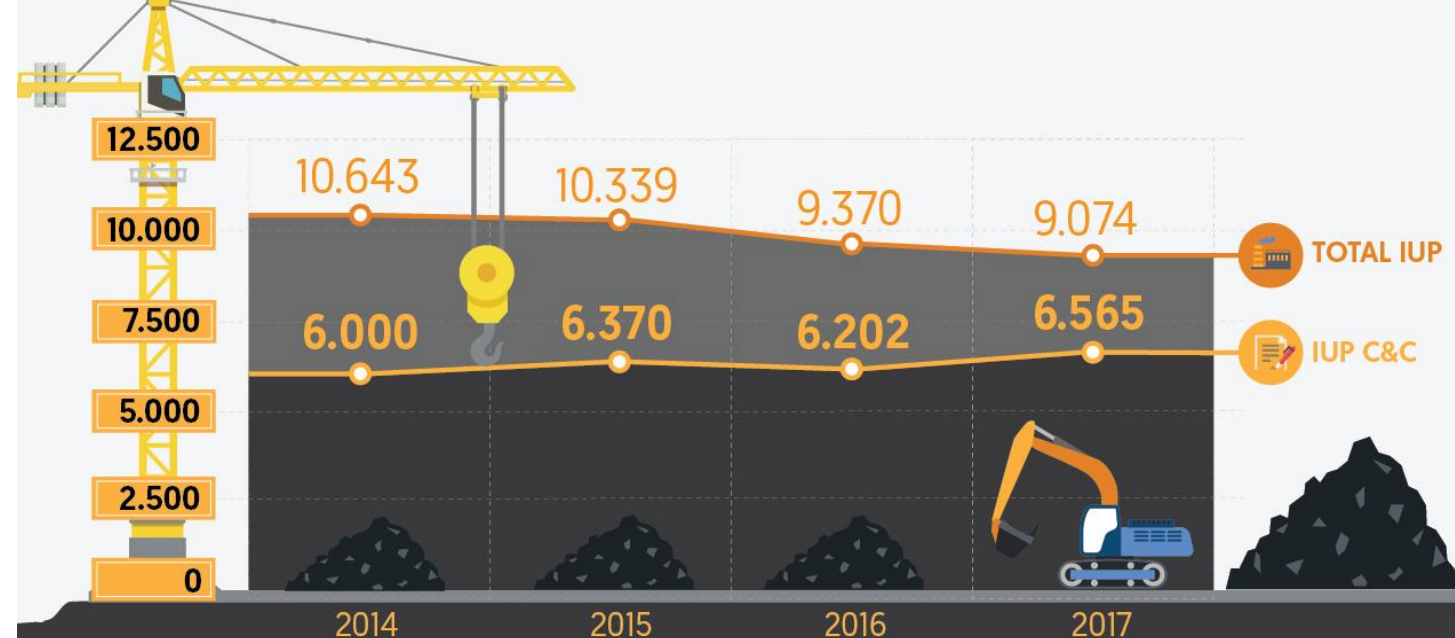
Mengatur tata cara pelaksanaan pengawasan perubahan kepemilikan saham dan direksi/komisaris Pemegang IUP/IUPK





# PENATAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Forum Korsup KPK dan Ditjen Minerba menghasilkan pencabutan 2.595 IUP oleh Pemerintah Daerah pada periode 2015-2017 sehingga mulai tahun 2018 semua IUP di Indonesia sebanyak 6.565 IUP sudah berstatus CnC



## PRODUKSI BATUBARA [Juta Ton]

Produksi batubara diutamakan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan sumber energi primer dalam negeri

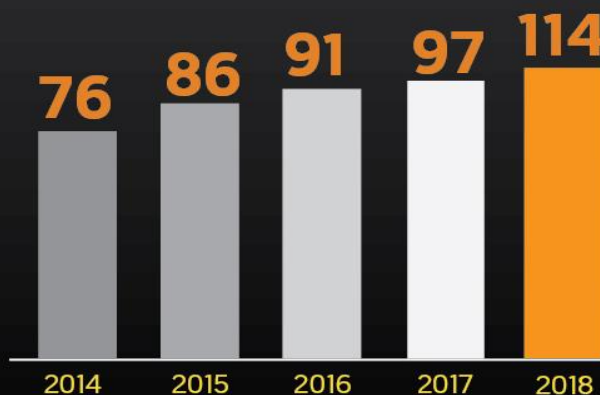
dalam juta ton



## PEMANFAATAN BATUBARA DOMESTIK [Juta Ton]

Menjamin pasokan kebutuhan sumber energi primer dan bahan baku di dalam negeri serta pembangunan PLTU Mulut Tambang

■ REALISASI ■ TARGET



## JUMLAH AMANDEMEN KONTRAK

\* Catatan:

- Untuk PKP2B, dari rencana 2018 sebanyak 18 PKP2B telah selesai seluruhnya.
- Untuk KK, dari rencana 2018 sebanyak 10 KK, telah selesai 7 KK, menyisakan 3 KK lainnya

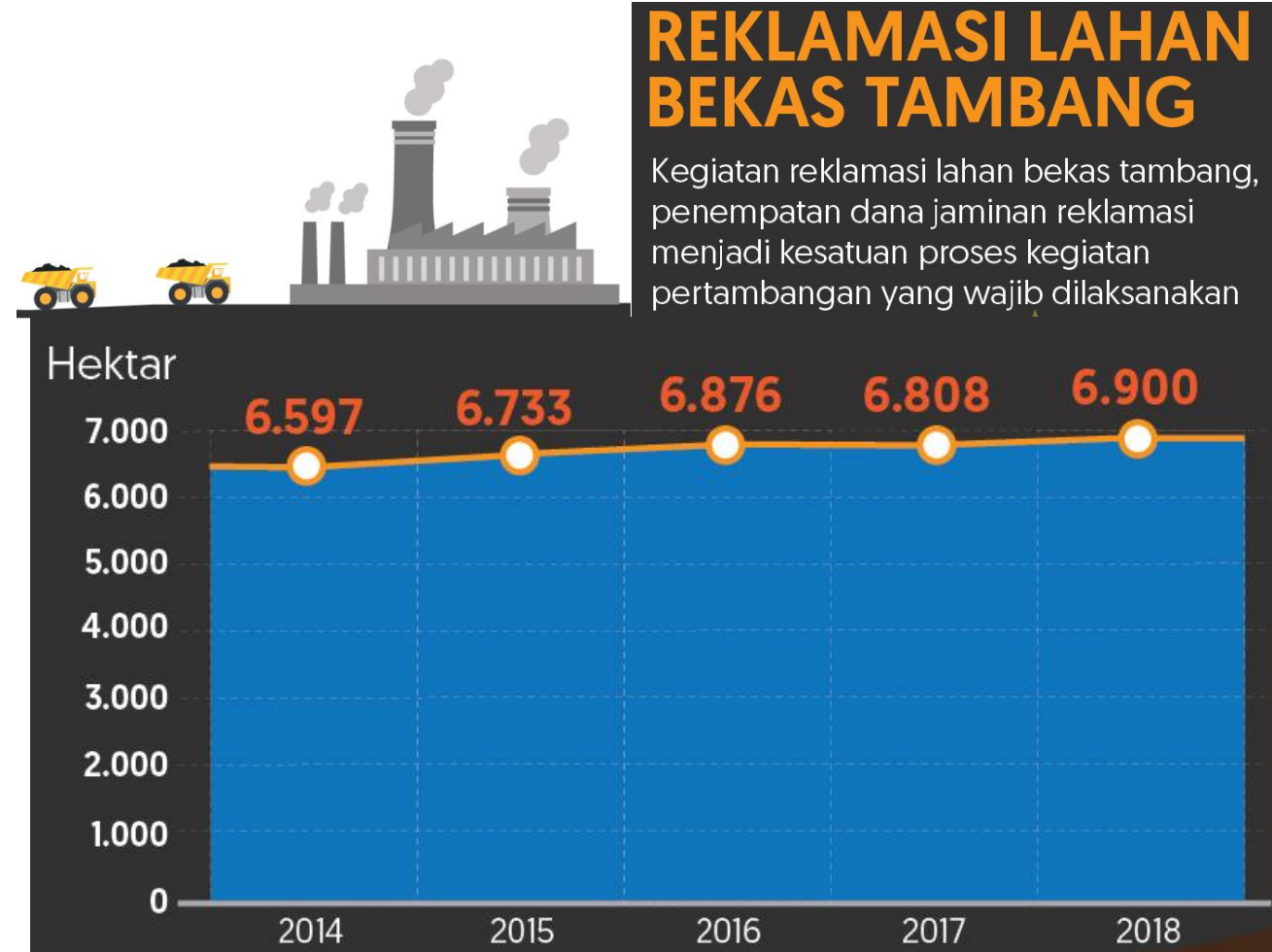
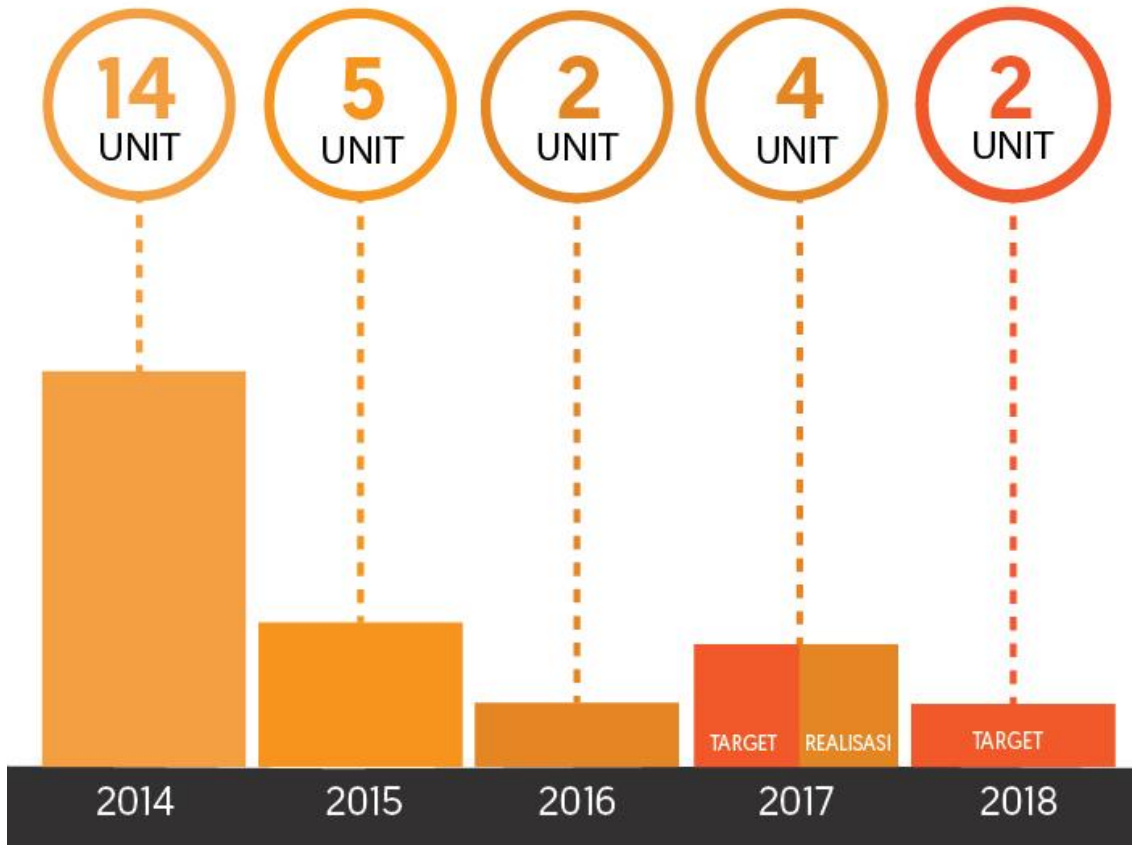
Status: Maret 2018

	2014	2015	2016	2017	2018*
PKP2B	0	22	0	28	18
KK	1	8	0	12	10



# PENGEMBANGAN FASILITAS PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

Peningkatan kepatuhan terhadap komitmen pembangunan smelter melalui evaluasi izin ekspor



# PNBP MINERBA TAHUN 2017 MELEBIHI TARGET

Penerimaan negara sektor MINERBA 2017 tembus **Rp.40,6 T**

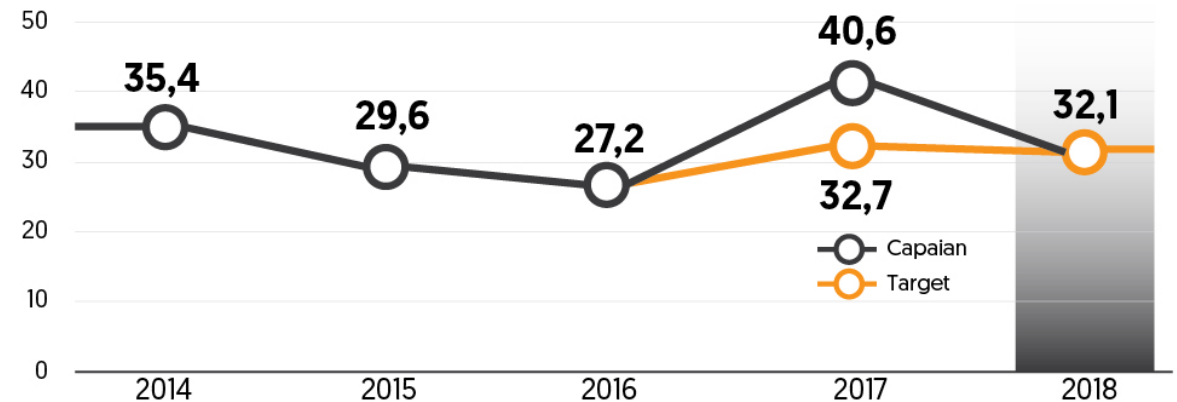
**124% target APBN-P 2017** sebesar **Rp.32,7 T**



## Komposisi Penerimaan Minerba Tahun 2017



## Penerimaan Negara Mineral dan Batubara triliun rupiah



# PERUNDINGAN PEMERINTAH DENGAN FREEPORT CAPAI KESEPAKATAN

27 AGUSTUS 2017

Divestasi 51% saham Freeport untuk kepemilikan Nasional

Freeport menyelesaikan smelter paling lambat 5 tahun

Penerimaan negara menjadi lebih besar dibanding selama ini

Perpanjangan 2x10 tahun apabila syarat-syarat dipenuhi



**FREEPORT** bersedia mengubah Kontrak Karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK)

Saat ini sedang berlangsung perundingan teknis lanjutan utamanya terkait divestasi dikoordinasi oleh Menteri BUMN dan Menteri Keuangan.

Tugas Kementerian ESDM mencakup perundingan pembangunan smelter, landasan hukum perusahaan, dan perpanjangan operasi, telah selesai.

## MANFAAT KESEPAKATAN NEGOSIASI TAMBANG PT FREEPORT INDONESIA

Kompleksitas operasi PTFI juga mencakup tambang bawah tanah dengan terowongan sepanjang ± 700 km



Kelangsungan operasi PTFI [aktifitas ekonomi Papua]



Pendapatan Negara meningkat



Terciptanya *multiplier effect* [Smelter + TKDN]



# PERUNDINGAN “TEKNIS LANJUTAN” FREEPORT



1

Perundingan teknis dilakukan mengenai isi hak dan kewajiban PTFI sebagai pemegang IUPK penyesuaian dari KK. Dimana isinya diupayakan menerapkan prevailing laws/mengikuti peraturan perundang-undangan yg berlaku saat di tandatangani IUPK

2

Tekait divestasi 51%, Pemerintah rencananya akan membeli Participating Interest Rio Tinto (40%) yang terdapat di PTFI, dan menugaskan PT Inalaum untuk membeli jumlah saham tersisa sehingga kepemilikan nasional akan mencapai 51%.

3

Saat ini sedang pembahasan due diligence dan valuasi nilai hak partisipasi yang akan dikonversi menjadi saham.

**Ditargetkan selesai  
April - Juni 2018.**



# REKAPITULASI KEJADIAN BENCANA GEOLOGI

Periode Januari - Februari 2018

# GEMPA BUMI



# 434

## Kejadian

Periode Jan - Feb 2018



# 2.858

## Rumah/ bangunan rusak



# 1

## Jiwa meninggal dunia

Magnitudo [SR]	Kejadian
4,0 - 4,9	<b>381</b> 105 Wilayah Barat 276 Wilayah Timur
5,0 - 5,9	<b>48</b> 11 Wilayah Barat 37 Wilayah Timur
6,0 - 6,9	<b>4</b> 1 Wilayah Barat 3 Wilayah Timur
> 7,0	<b>1</b> 0 Wilayah Barat 1 Wilayah Timur
Gempabumi merusak	<b>3</b> Lebak - Banten Pidie - Aceh Bovendigoel - Papua

## Tanggap Darurat

## Badan Geologi Kementerian ESDM

Pemeriksaan dampak gempa bumi, pengukuran dan analisis data mikrotremor, koordinasi dan penyampaian rekomendasi kepada Pemda dan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung maupun media massa



Download aplikasi informasi bencana geologi  
<http://magma.esdm.go.id>



# REKAPITULASI KEJADIAN BENCANA GEOLOGI

Periode Januari - Februari 2018

AKTIVITAS

# GUNUNGAPI



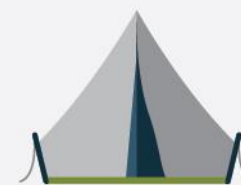
« 69

Gunungapi yang aktivitasnya  
diamati secara intensif  
periode Januari - Februari 2018



4 Gunungapi  
mengalami erupsi

- Sinabung, Sumut - terekam **126 kali**
- Agung, Bali - terekam **15 kali**
- Dukono, Maluku - terekam **144 kali**
- Ibu, Maluku - terekam **2.629 kali**



**56.207**

Jiwa dilaporkan  
mengungsi

Tanggap Darurat  
Badan Geologi KESDM



Tanggap darurat, penyelidikan, pemetaan,  
sosialisasi dan peringatan dini



[www.esdm.go.id](http://www.esdm.go.id)



Kementerian Energi dan  
Sumber Daya Mineral



@KementerianESDM



@kesdm



Kementerian ESDM

# REKAPITULASI KEJADIAN BENCANA GEOLOGI

Periode Januari - Februari 2018

# GERAKAN TANAH



# 252

Kejadian Gerakan Tanah  
periode Januari - Februari 2018



**555** rumah/bangunan rusak



**54** jiwa meninggal dunia



**4.512** jiwa mengungsi



**84** Titik gerakan tanah/longsor

**25** Kabupaten/kota

*Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Bandung Barat, Garut, Tasikmalaya, Sumedang, Kuningan, Brebes, Banjarnegara, Purbalingga, Purworwjo, Kebumen, Sleman, Bantul, Gunungkidul, Kulonprogo, Magelang, Semarang, Pasaman, Ponorogo, Pacitan*

## Tanggap Darurat Badan Geologi KESDM

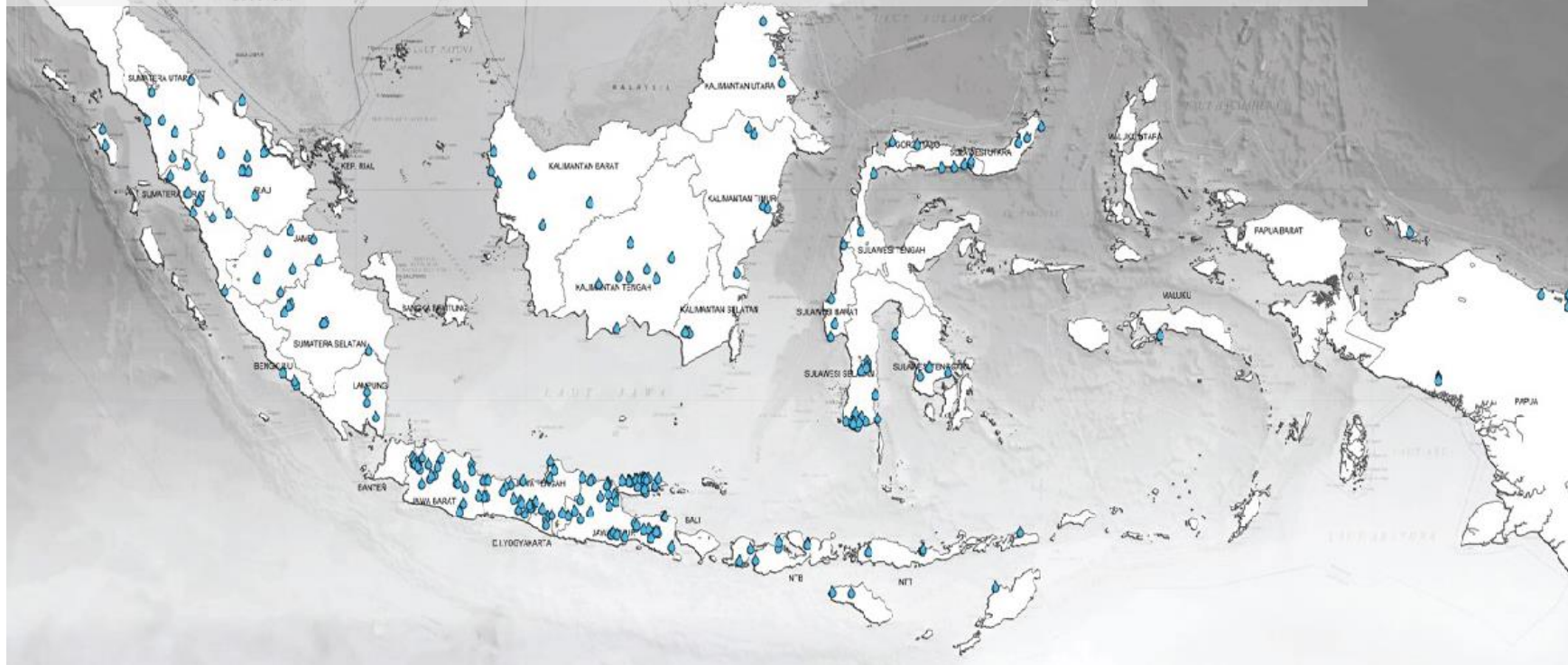


Tanggap darurat, penyelidikan, pemeriksaan lahan relokasi, memberikan rekomendasi, dan sosialisasi.





# Pengeboran Air Tanah di Daerah Sulit Air



NO	PROVINSI	JUMLAH	NO	PROVINSI	JUMLAH
1.	Aceh	2 titik	14.	Kalimantan Tengah	8 titik
2.	Sumatera Utara	8 titik	15.	Kalimantan Selatan	3 titik
3.	Sumatera Barat	9 titik	16.	Kalimantan Utara	3 titik
4.	Riau	9 titik	17.	Sulawesi Barat	4 titik
5.	Jambi	7 titik	18.	Sulawesi Utara	3 titik
6.	Bengkulu	4 titik	19.	Sulawesi Selatan	15 titik
7.	Lampung	4 titik	20.	Sulawesi Tengah	4 titik
8.	Jawa Barat	24 titik	21.	Sulawesi Tenggara	4 titik
9.	Jawa Tengah	26 titik	22.	NTT	7 titik
10.	DI Yogyakarta	3 titik	23.	NTB	7 titik
11.	Jawa Timur	53 titik	24.	Maluku	1 titik
12.	Kalimantan Barat	6 titik	25.	Papua	7 titik
13.	Kalimantan Timur	5 titik			

**238 TITIK**  
sumur bor air tanah

dibangun tahun 2017  
di **25 provinsi**

Hingga 2017,  
total telah dibangun

**1.782 TITIK**  
sumur bor air tanah

KAPASITAS  
**112,4 JUTA**  
M3/Tahun

LAYANAN  
**4,9 JUTA**  
Jiwa



Target 2018

**500 SUMUR BOR**  
179 Kabupaten

Layanan  
**1 JUTA**  
Jiwa



## Penurunan Level Status Gunung Agung dari Status Awas (Level IV) ke Status Siaga (Level III), 10 Februari 2018



# Desa Aou, Kec. Pulau Tiga, Asmat, 100% Elektrifikasi





## 110 Unit LTHSE, Desa Sori Tatanga, Dompu, NTB, 18 November 2017



# Sebanyak 33 Unit LTSHE di Desa Munak, Jayawijaya, 22 Desember 2017



## Sebanyak 20.851 unit LTSHE terpasang di Kabupaten Lanny Jaya (15 Distrik)



# Pegunungan Lanny Jaya di malam hari dengan Lampu LTSHE





# 529 unit LTSHE di Kab. Tambrau, 13 Februari 2018



**Peresmian PLTS Terpusat *Off Grid* (30 kWp), Desa Amdui, Kab. Raja Ampat, Papua Barat, 21 Agustus 2017**



**“Dapat melistriki 130 KK di 103 rumah ~ tiap rumah rata-rata mendapat jatah sekitar 600 watt jam per harinya”**

# Terima Kasih & Follow Kami



# Pemanfaatan EBT untuk Listrik yang Terjangkau oleh Rakyat dan Ramah Lingkungan

■ Permen ESDM No. 50/2017

■ Pelaksanaan Pembelian Tenaga Listrik



Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan



Melalui Mekanisme Pemilihan Langsung



PLTP dan PLTSa



PLTA, PLTS PLTB, PLTBm, PLTALaut dan PLTBg

■ Harga Pembelian Tenaga Listrik

Jika BPP Pembangkitan di Sistem Ketenagalistrikan Setempat:

- ✓ PLTS
- ✓ PLTB
- ✓ PLTBm
- ✓ PLTBg
- ✓ PLTALaut

Rata-rata BPP Pembangkitan Nasional

➤ Harga Pembelian maksimal **85%** dari BPP Pembangkitan Setempat

⋈ Rata-rata BPP Pembangkitan Nasional BPP Berdasarkan kesepakatan (BtoB)

- ✓ PLTSa
- ✓ PLTP
- ✓ PLTA

Jika BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat ➤ Rata-rata BPP pembangkitan Nasional

▶ Harga Pembelian Maksimal **100 %** dari BPP pembangkitan Nasional

Berdasarkan Kesepakatan , Jika BPP Pembangkitan di Wilayah Sumatera, Jawa, Bali atau Wilayah Kelistrikan setempat ⋈ Rata-rata BPP Pembangkitan Nasional



# Pengembangan Pembangkit Listrik EBT

## PLT Bayu Sidrap (30x2,5 MW)

Direncanakan COD pada Kuartal I 2018

Lokasi di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan

Proyek EBT Skala Besar



Target COD :  
Kuartal I 2018



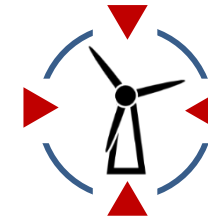
Harga PPA :  
US\$ 11,41 cent/kWh



Investasi :  
US\$ 150 Juta



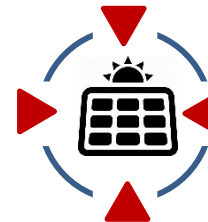
Rata-rata Kecepatan Angin :  
(85 m) 7+ m/s (25+ KPH)



PLTB Jeneponto  
Kapasitas 60 MW

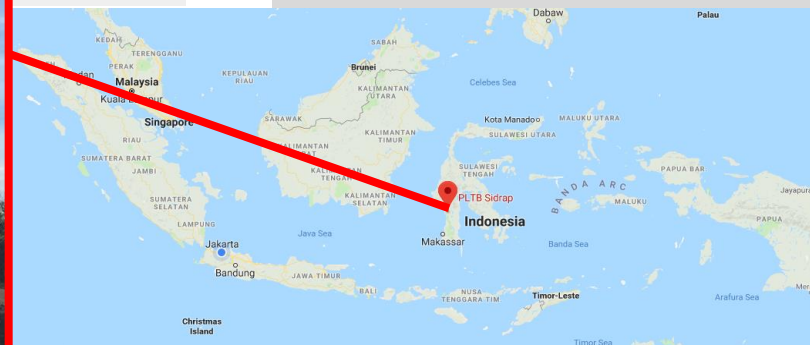
PLTB Sidrap II  
Kapasitas 50 MW

PLTB Tanah Laut  
Kapasitas 70 MW



PLTS Terapung  
Cirata

Kapasitas 200 MW



# KEPASTIAN USAHA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK

## Pokok-pokok Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

■ Permen ESDM Nomor 49 Tahun 2017



Memberikan kepastian usaha:

- Resiko *government force majeure* dihapus
- Keseimbangan/pembagian resiko yang berkeadilan

### LATAR BELAKANG

- Kesetaraan resiko jual beli listrik antara PLN dengan IPP
- Menjamin kehandalan pasokan listrik
- Bentuk penguasaan negara dalam penyediaan listrik
- Standar Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL)

### POLA KERJASAMA PLN - IPP\*

\*IPP = Independent Power Producer

#### BOOT (Build, Own, Operate, Transfer)

Membangun, Memiliki, Mengoperasikan, dan Mengalihkan

#### Catatan :

Sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU Ketenagalistrikan terkait prinsip penguasaan negara atas ketenagalistrikan



### Umur Teknis, Paling Lama

Paling lama

**30 tahun**

sejak beroperasi secara komersil  
(*commercial operation date/COD*)



### KETENTUAN COMMERCIAL OPERATION DATE (COD)

Keterlambatan COD



IPP dikenakan penalti

Percepatan COD  
atas permintaan PLN



IPP mendapat insentif



### DEPRESIASI CAPITAL INVESTMENT

Minimal

**20 tahun**

dalam penentuan  
harga jual tenaga listrik



### KETENTUAN TRANSAKSI

#### Delivery or Pay

Jika **IPP tidak supply energi listrik sesuai kontrak**  
karena kesalahan IPP ▶ IPP dikenakan penalti

#### Take or Pay

Jika **PLN tidak dapat menyerap energi listrik sesuai kontrak**  
karena kesalahan PLN ▶ PLN membayar penalti ke IPP



# MEWUJUDKAN HARGA LISTRIK YANG SEMAKIN TERJANGKAU OLEH RAKYAT (1/2)

## PERATURAN MENTERI ESDM NO.19 TAHUN 2017\*

\*TENTANG PEMANFAATAN BATUBARA UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK DAN PEMBELIAN KELEBIHAN TENAGA LISTRIK (EXCESS POWER)

### PEMBANGKIT LISTRIK MULUT TAMBANG:

Pembangkit listrik tenaga uap dan gas batubara, yang ketersediaannya dijamin oleh perusahaan tambang batubara sesuai kesepakatan jual beli.

#### MANFAAT:

- ✓ **EFISIEN:** Lokasi pembangkit listrik paralel dengan lokasi tambang batubara, sehingga memangkas biaya distribusi dan transportasi.
- ✓ **RAMAH LINGKUNGAN:** Infrastruktur transportasi umum (jalan dan sungai) terjaga dari kerusakan dan berkurangnya polusi udara.

### SYARAT DAN MEKANISME

#### PEMBANGKIT LISTRIK BATUBARA MULUT TAMBANG

- Pembelian tenaga listrik dapat melalui penunjukan langsung
- PT PLN dan Badan Usaha Pembangkit Tenaga Listrik wajib memastikan pasokan batubara sesuai PJBL
- PJBL dilaksanakan untuk jangka waktu 30 Tahun sejak COD (Skema BOOT)

#### PEMBANGKIT LISTRIK BATUBARA NON MULUT TAMBANG

- Pembelian tenaga listrik dilakukan berdasarkan PJBL, dalam jangka waktu 30 Tahun sejak COD (Skema BOOT)

#### Harga Pembelian Tenaga Listrik :

- Jika BPP Pembangkitan setempat  $\leq$  rata-rata BPP Pembangkitan nasional, harga patokan tertinggi sebesar **75%** BPP Pembangkitan setempat
- Jika BPP Pembangkitan setempat  $>$  BPP Pembangkitan nasional, harga patokan tertinggi sebesar **75%** BPP Pembangkitan nasional
- Harga pembelian tenaga listrik ditetapkan dengan asumsi faktor kapasitas pembangkit sebesar **80%**

#### Harga Pembelian Tenaga Listrik :

- **Lebih Besar dari 100 MW**
  - Jika BPP Pembangkitan setempat  $\leq$  BPP Pembangkitan nasional harga patokan tertinggi sebesar BPP Pembangkitan setempat
  - Jika BPP Pembangkitan setempat  $>$  BPP Pembangkitan nasional harga patokan tertinggi sebesar BPP Pembangkitan nasional
- **Kapasitas sampai dengan 100 MW**
  - Jika BPP Pembangkitan setempat  $\leq$  BPP Pembangkitan nasional harga patokan tertinggi sebesar BPP Pembangkitan setempat
  - Jika BPP Pembangkitan setempat  $>$  BPP Pembangkitan nasional harga ditetapkan berdasarkan lelang atau B to B
- Harga Pembelian tenaga listrik ditetapkan dengan asumsi kapasitas faktor pembangkit **80%**



#EnergiBerkeadilan

Keterangan :  
BPP: Biaya Pokok Penyediaan  
COD: Commercial Operation Date  
PJBL: Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik  
BOOT: Build (Membangun), Own (Memiliki), Operate (Mengoperasikan), Transfer (Mengalihkan)  
B to B: Business to Business





# Mewujudkan harga listrik yang semakin terjangkau oleh rakyat (2/2)

Permen ESDM No.45 Tahun 2017

Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik

## Gas untuk Pembangkit Listrik di Mulut Sumur (Wellhead)

“dapat dilakukan dengan penunjukan secara langsung”



Menjamin ketersediaan pasokan gas dengan harga yang wajar dan kompetitif, baik untuk gas pipa maupun LNG;



Memberikan kemudahan dalam pengaturan alokasi gas bagi pembangkit listrik.



Pengembangan pembangkit listrik di mulut sumur (wellhead) melalui penunjukan langsung atau pelelangan umum;

1

Penunjukan Langsung  
Harga Gas  $\leq 8\%$  ICP /MMBTU



2

Lelang Umum  
Harga Gas  $> 8\%$  ICP /MMBTU

## Gas untuk Pembangkit Listrik Selain di Mulut Sumur (Wellhead)

14,5%  
ICP/MMBTU

Batas harga gas paling tinggi untuk pembangkit listrik (plant gate)

**Keterangan:**

ICP = Indonesian Crude Price  
LNG = Liquefied Natural gas  
MMBTU = Million British Thermal Units

Jika Lebih Tinggi dari

14,5%  
ICP/MMBTU

- a. Boleh membeli LNG di bawah penawaran harga Gas Bumi melalui Pipa;
- b. Jika Harga LNG Domesti  $\leq$  Harga LNG Import (plant gate), wajib membeli dari dalam negeri;
- c. Jika ketentuan di atas tidak tercapai, Menteri ESDM dapat menetapkan kebijakan penyediaan Gas Bumi untuk pembangkit.



#EnergiBerkeadilan







## Participating Interest 10%



Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM  
No. 37 Tahun 2016

*Participating Interest (PI) 10%* adalah besaran maksimal 10% PI pada KKS yang wajib ditawarkan oleh kontraktor pada BUMD atau BUMN.



Bertujuan untuk meningkatkan peran serta daerah dan nasional dalam pengelolaan migas



Kepemilikan saham BUMD dan PI 10% tidak bisa diperjualbelikan /dialihkan/dijaminkan



BUMD disahkan melalui Perda dan berbentuk Perusda (100% Pemda) atau Perseroan Terbatas (minimal 99% Pemda dan sisanya terafiliasi dengan Pemda)



BUMD khusus mengelola PI 10%, dan satu BUMD hanya mengelola satu PI 10%

### SKEMA KERJA SAMA BUMD



1. Gubernur mengkoordinir, menyiapkan dan menunjuk BUMD penerima penawaran PI 10%
2. Kontraktor membiayai terlebih dahulu besaran kewajiban BUMD
3. Pengembalian pembiayaan kepada Kontraktor dilakukan tiap tahun tanpa bunga dari hasil produksi bagian BUMD dengan tetap menjamin penerimaan bagi hasil untuk BUMD

### SKEMA KERJA SAMA BUMN



1. Bila BUMD tidak menyatakan minat, Kontraktor wajib menawarkan PI 10% kepada BUMN
2. BUMN membiayai sendiri besaran kewajiban sesuai kelaziman bisnis



# Pembangunan Kilang Minyak oleh Badan Usaha Swasta

Berdasarkan Permen ESDM No.35 Tahun 2016



## Insentif dan Fasilitas



insentif fiskal dan non fiskal;



diintegrasikan dengan pemroduksian petrokimia.

## Bahan Baku

### Minyak Bumi



### Kondensat



yang berasal dari:  
1) dalam negeri  
2) impor

## Proses Pembangunan

- Menggunakan **teknologi ramah lingkungan**
- Mengutamakan penggunaan **produk dalam negeri**



## Mengapa Perlu Kilang Swasta?

1. Mewujudkan **ketahanan energi**;
2. Penambahan **volume kapasitas produksi** BBM nasional;
3. Mengurangi **ketergantungan impor** BBM;
4. Optimalisasi **partisipasi** Badan Usaha Swasta.

## Hasil Produksi

- Bahan Bakar Minyak **diutamakan** untuk memenuhi **kebutuhan dalam negeri**.
- Dapat dijual ke luar negeri dengan **mempertimbangkan kebutuhan dalam negeri**.
- Dapat dijual kepada **semua pengguna akhir** di dalam negeri (diberi Izin Usaha Niaga Umum).



# Bagian Negara Lebih Baik, Keuntungan Lebih Bagi Kontraktor

Porsi *cost recovery* selalu mengalami kenaikan



## Skema Gross Split



Base Split dapat disesuaikan berdasarkan 13 Komponen, Yaitu:

### 10 KOMPONEN VARIABLE

1. Status lapangan
2. Lokasi lapangan (onshore, offshore)
3. Kedalaman reservoir
4. Ketersediaan infrastruktur pendukung
5. Jenis reservoir
6. Kandungan CO2
7. Kandungan H2S
8. Berat Jenis minyak bumi
9. Tingkat Komponen Dalam Negeri
10. Tahapan produksi

### 3 KOMPONEN PROGRESIF

1. Harga Minyak Bumi
2. Harga Gas Bumi
3. Kumulatif Produksi Minyak dan Gas

Pemerintah masih mendapatkan tambahan dari pajak

Gross Split membuat biaya operasi lebih efisien

- Biaya operasi menjadi tanggung jawab Kontraktor
- Kontraktor secara alami akan melakukan penghematan

**!** *Cost Recovery* cenderung tidak efisien

- *Cost recovery* menjadi tanggungan Negara & Kontraktor
- Sejak tahun 2015, *cost recovery* lebih besar dari penerimaan negara

